SINERGi

Edisi 5 | Juni 2026

Menuju Kedaulatan Pangan, Energi, & Ekonomi Indonesia

Kepala Daerah Membangung Potensi Wilayah, Kedaulatan Pangan dan Energi untuk Kesejahteraan rakyat

DAFTAR ISI

I. PENGANTAR DAN ARAH KEBIJAKAN

4 Tajuk Redaksi: Tiga Pilar Kedaulatan: Mengembalikan Marwah Bangsa dari Desa hingga Pusat.

7 Kata Pengantar Ketua BP3U DPP PKS: Pejabat Publik sebagai Garda Terdepan Penjaga Kedaulatan Rakyat.

II. FONDASI PEMIKIRAN & MILAD 24 PKS

11 Refleksi Milad 24 PKS: Dua Puluh Pandangan Berkhidmat: Konsistensi PKS dalam Mewujudkan Indonesia Berdaulat.

18 Catatan Ketua Majelis Syura PKS: Visi Kedaulatan Bangsa: Menyongsong Indonesia Emas dengan Kemandirian Pangan dan Energi.

23 Kepemimpinan Pejabat Publik: Kepemimpinan Strategis di Era Krisis Global: Membangun Resiliensi Ekonomi Daerah.

28 Kajian Ideologis: Reorientasi Teoretis Ekonomi Pancasila & Epistemologi Sosialisme Islam: Melacak Akar Kedaulatan Ekonomi dari Bung Hatta, Mubyarto, hingga Tjokroaminoto.

III. ANALISIS STRUKTURAL & KEBIJAKAN

37 Analisis Struktural & Kebijakan | Catatan Strategis dari Sarasehan Kepala Daerah PKS: Komitmen Menuju Swasembada Pangan dan Energi di Tingkat Wilayah

43 Analisis Sektoral Daerah | Membuka Gerbang Barat: Strategi Transformasi Ekonomi dan Terobosan Investasi di Tengah Keterbatasan Fiskal Sumatera Barat

49 "Analisis Sektoral Daerah | Melampaui Kejayaan Batubara: Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Sinergi Maritim di Kabupaten Kutai Timur"

56 Analisis Sektoral Daerah | Membangun Potensi Wilayah untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Rakyat: Studi Kasus Transformasi Ekonomi Berkelanjutan di Kabupaten Berau

62 Analisis Sektoral Daerah | Pilar Agromaritim di Gerbang Timur: Kemandirian Pangan dan Kelautan Berbasis Bingkai Saruma di Kabupaten Halmahera Selatan

67 Analisis Sektoral Multi-wilayah | Sinergi Kepemimpinan Daerah: Akselerasi Pembangunan Terpadu di Enam Wilayah Strategis

IV. LAPORAN UTAMA

75 Laporan Utama | Semarak Milad 24 PKS: Dari Solusi Nyata di Akar Rumput hingga Konsolidasi Kedaulatan Bangsa

TIM PENGARAH: ● Presiden PKS ● Sekjen PKS ● Ketua BP3U ● Ketua Fraksi PKS DPR RI ● Ketua KSP. ● Ketua Bidang Komdigi **TIM PENGARAH KONTEN** ● Ketua BP3U Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si. ● Sekretaris BP3U dr. H. Pamungkas Hendra Kusuma ● Wakil Sekretaris BP3U Arief Rahman Hakim, S.I.Kom ● Kabiro Pembinaan Pejabaf Publik: Teddy Rusmawan, AT., MM. ● Kabiro Data Perencanaan: dr. Helmi Budiman, MM. ● Kabiro Monev: Dr. H. Agung Budi Margono, ST., MT. ● Kabiro Pembinaan Keluarga Pejabat Publik: Hj. Nevi Zaurina ● Kabiro Sistem Pendukung : H. Riza Falepi, ST., MT. **TIM REDAKSI** ● Chairoman J. Putro, B.Eng., M.Si. ● Dr. Apiatno, SE, MSi ● Daud Abdullah, STP **TIM PRODUKSI** ● Hafidz Muftisany ● Adiela ● Lisa Epriani ● Faiz Ayyas ● Boy Hamidy

1

Pengantar dan Arah Kebijakan

TAJUK REDAKSI

Tiga Pilar Kedaulatan: Mengembalikan Marwah Bangsa dari Desa hingga Pusat

Republik di Persimpangan Jalan

Dua puluh empat tahun kiprah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi momentum kontemplasi ideologis di tengah situasi dunia yang tidak menentu. Geopolitik global yang memanas, disrupsi rantai pasok, inflasi, dan perubahan iklim ekstrem kini berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Di tengah krisis ini, Indonesia dihadapkan pada pilihan eksistensial: tetap bergantung pada pasar global atau berani mandiri di atas kaki sendiri.

Pemerintah memang menempatkan swasembada pangan, energi, dan air dalam misi Asta Cita serta RPJMN 2025-2029. Namun, kemandirian sejati tidak akan tercapai hanya melalui pendekatan teknokratis yang kompromistis. Upaya ini adalah pertarungan ideologis. Kita harus mendekonstruksi paradigma pembangunan kapitalistik-neoliberal yang mengeksploitasi alam secara ekstraktif dan meminggirkan masyarakat pedesaan demi mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

Pilar Pertama: Menuntut Kedaulatan Pangan, Menolak Ilusi "Food Security"

Selama ini kebijakan pangan kita terjebak dalam ilusi "ketahanan pangan" (food security) ala neoliberal. Konsep ini hanya fokus pada ketersediaan komoditas murah di pasar tanpa peduli dari mana asalnya (food from anywhere), bahkan jika harus mengorbankan petani lokal melalui

> Sebaliknya, kedaulatan pangan (food sovereignty) menegaskan hak bangsa untuk memproduksi pangannya sendiri secara mandiri dan ekologis. Kita harus menempatkan petani gurem dan nelayan tradisional sebagai subjek utama melalui reforma agraria sejati, penyediaan benih unggul adaptif iklim, dan integrasi data tunggal.

impor masif. Impor ugal-ugalan ini merusak harga gabah lokal dan mematikan kebudayaan agraris pedesaan.

Sebaliknya, kedaulatan pangan (food sovereignty) menegaskan hak bangsa untuk memproduksi pangannya sendiri secara mandiri dan ekologis. Kita harus menempatkan petani gurem dan nelayan tradisional sebagai subjek utama melalui reforma agraria sejati, penyediaan benih unggul adaptif iklim, dan integrasi data tunggal. Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diarahkan sebagai instrumen fiskal untuk mengalirkan uang kembali ke desa dan menyerap hasil panen lokal demi menghidupkan lumbung desa.

Pilar Kedua: Transisi Energi Berkeadilan vs Perangkap Industri Kotor

Sektor energi Indonesia menghadapi tantangan berat akibat merosotnya produksi migas hulu dan ketergantungan impor LPG. Di sisi lain, ambisi hilirisasi nikel justru memicu kontradiksi ekologis karena smelter-smelter pengolahan nikel didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara mandiri (captive coal). Pembangunan PLTU industri ini menciptakan zona pengorbanan polusi yang merusak ruang hidup masyarakat lokal. Sungguh ironis ketika nikel untuk baterai kendaraan hijau global diproduksi melalui energi fosil kotor yang tinggi emisi karbon.

Kedaulatan energi menuntut

"Mohammad Hatta sejak awal merancang koperasi sebagai wadah gotong royong dan solidaritas moral untuk membela ekonomi kaum lemah, selaras dengan prinsip kemitraan syirkah."

transisi hijau yang berkeadilan (green developmentalism). Celah regulasi yang mempermudah pembangunan PLTU batubara baru harus dicabut. Sebagai gantinya, daerah harus didorong untuk mengoptimalkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) lokal demi kemandirian listrik rakyat tanpa merusak bentang alam daerah.

Pilar Soko Guru: Ekonomi Pancasila dan Koperasi Kerakyatan

Fondasi dari seluruh pilar kedaulatan ini adalah demokrasi ekonomi. Mohammad Hatta sejak awal merancang koperasi sebagai wadah gotong royong dan solidaritas moral untuk membela ekonomi kaum lemah, selaras dengan prinsip kemitraan syirkah. Visi ini dikembangkan oleh Prof. Mubyarto melalui Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), yang menolak asumsi manusia sebagai makhluk egois rasional (homo economicus) dan menekankan tanggung jawab sosial serta keadilan ekologis.

Dalam kebijakan modern, prinsip ini harus diwujudkan dengan memperkuat kendali negara dan koperasi atas cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kita harus memperkuat ekosistem ekonomi madani dengan memosisikan Koperasi Pertanian dan BUMDes sebagai pengelola utama rantai pasok pupuk subsidi, penyedia modal bebas riba, dan pengendali harga komoditas. Langkah ini krusial untuk memutus rantai tengkulak yang mengeksploitasi pedesaan.

Dari Desa Mengembalikan Marwah Bangsa

Perjuangan mengembalikan marwah bangsa harus dimulai dari unit sosial terkecil, yaitu desa. Desa adalah benteng pertahanan pangan, lumbung energi masa depan, dan basis ekonomi gotong royong kita. Ketika desa berdaya, kedaulatan nasional secara otomatis akan tegak hingga ke pusat kekuasaan.

Di sinilah pejabat publik PKS—baik eksekutif maupun legislatif—dituntut untuk berperan sebagai "Dirigen Kedaulatan". Melalui pilar karakter yang Bersih, Peduli, dan Profesional Negarawan, setiap kebijakan lokal yang dilahirkan harus menjadi penguat kemandirian bangsa. Dua puluh empat tahun khidmat PKS adalah janji untuk terus memastikan setiap piring di meja makan rakyat terisi oleh peluh petani sendiri, dan setiap lampu menyala dengan energi milik bumi pertiwi.

KATA PENGANTAR

Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.
Ketua BP3U DPP PKS

Pejabat Publik sebagai Garda Terdepan Penjaga Kedaulatan Rakyat

Menatap Ulang Arti Kedaulatan

Pasca Milad ke-24 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bangsa kita berada di persimpangan jalan sejarah yang sangat menentukan. Ketidakpastian situasi ekonomi global yang kian fluktuatif, eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia yang tak kunjung mereda, serta dampak nyata perubahan iklim ekstrem kini bukan lagi sekadar isu di atas kertas. Krisis-krisis tersebut telah menjelma menjadi ancaman langsung yang mengetuk pintu-pintu rumah rakyat kita—mulai dari lonjakan harga bahan pokok hingga kerentanan pasokan energi nasional. Menghadapi dinamika ini, hanya ada satu respons kolektif yang tegas: Indonesia harus berdaulat.

Kedaulatan sejati bukanlah slogan politik yang kosong dan digaungkan saat momentum elektoral semata. Ia adalah keharusan mendesak yang ditopang oleh tiga pilar utama yang saling bertautan: kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kedaulatan ekonomi. Meskipun pemerintah pusat telah merumuskan arah kebijakan swasembada ini sebagai fondasi utama transformasi bangsa melalui misi Asta Cita dan dokumen RPJMN, kita harus sadar bahwa rancangan makro tersebut

"Kedaulatan dan kemandirian bangsa bukanlah sebuah hadiah cuma-cuma yang akan diberikan oleh kekuatan global kepada kita. Kedaulatan harus diperjuangkan sejengkal demi sejengkal melalui regulasi yang berpihak pada rakyat, kerja keras yang konsisten, dan kehadiran kepemimpinan daerah yang visioner."

tidak akan pernah membumi tanpa adanya eksekusi taktis yang tangguh di tingkat lokal.

Di sinilah letak peran vital kepemimpinan daerah. Para kepala daerah dan Anggota Legislatif (Aleg) PKS di seluruh penjuru Nusantara adalah ujung tombak perjuangan ini. Merekalah yang bersentuhan langsung dengan realitas bumi pertiwi; menggerakkan potensi agraris wilayah, merumuskan peraturan daerah yang melindungi petani lokal, serta memastikan bahwa setiap piring rakyat terisi oleh hasil panen mandiri dan setiap rumah tangga dapat menikmati energi bersih yang dikelola secara adil tanpa membebani keuangan mereka.

Amanah Publik dan Arsitektur Pembinaan Pejabat Publik

Kedaulatan ekonomi, pangan, dan energi yang berkeadilan tidak akan pernah lahir dari sistem birokrasi yang korup, transaksional, atau rapuh. Kedaulatan menuntut sebuah prasyarat mutlak: tata kelola partai politik yang bersih dan akuntabel (good political party governance). Hanya melalui parpol yang sehatlah akan lahir para pemimpin publik yang memiliki integritas tanpa kompromi. Sebagai representasi dari nilai-nilai dakwah dan perjuangan partai, setiap pejabat publik PKS memikul beban amanah rakyat yang teramat berat di pundak mereka.

Menjawab tantangan kepemimpinan di era krisis ini, Badan Pembinaan dan Pengembangan Pejabat Publik (BP3U) secara resmi melahirkan Panduan Pengelolaan Anggota yang Menjadi Pejabat Publik PKS. Ini merupakan sebuah langkah strategis sekaligus bersejarah bagi PKS dalam menegakkan standarisasi integritas, profesionalitas, dan keselarasan gerak kader dengan visi besar nasional partai.

Sistem pembinaan yang kami rancang tidak bertujuan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk menempa dan melahirkan "Dirigen Kedaulatan" di tingkat daerah. Layaknya seorang dirigen dalam sebuah orkestra, pejabat publik PKS harus

mampu menyelaraskan instrumen eksekutif dan legislatif, merangkul kelompok masyarakat sipil, serta memobilisasi kekuatan ekonomi lokal guna menciptakan simfoni pembangunan daerah yang bermuara pada satu hal: kemaslahatan rakyat jelata.

Tiga Pilar Karakter: Bersih, Peduli, Profesional Negarawan

Dalam menavigasi badai krisis multidimensi ini, pejabat publik PKS wajib menerjemahkan nilai utama partai ke dalam aksi nyata yang terukur melalui tiga pilar karakter utama:

1. **Bersih:** Karakter ini adalah perisai utama untuk menutup rapat setiap celah penyelewengan, termasuk praktik mafia pangan dan energi di daerah. Bersih berarti memastikan bahwa skema distribusi pupuk bersubsidi, tata niaga pangan, hingga pemberian konsesi energi terbarukan lokal berjalan transparan dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan petani gurem serta nelayan tradisional, bukan para pemburu rente.
2. **Peduli:** Pejabat PKS harus memiliki sensitivitas sosial yang tinggi terhadap jeritan dan kesulitan hidup rakyat yang terhimpit inflasi serta ketimpangan pasar. Kepedulian ini tidak boleh berhenti pada retorika empati, melainkan wajib ditransformasikan ke dalam kebijakan jaring

pengaman sosial yang efektif, penguatan kapasitas koperasi rakyat, serta revitalisasi BUMDes sebagai benteng pertahanan ekonomi madani di pedesaan.

3. **Profesional Negarawan:** Karakter ini menuntut perpaduan antara kecakapan teknokratis yang mumpuni dengan cara pandang negarawan yang berorientasi jangka panjang. Pejabat publik PKS tidak boleh terjebak pada pertumbuhan ekonomi semu yang ekstraktif dan merusak lingkungan. Mereka harus berani mengambil keputusan strategis untuk melindungi aset publik, menghentikan eksploitasi lingkungan yang berlebihan, dan memimpin transisi industri hijau yang berkeadilan ekologis dan sosial.

Sistem Terintegrasi untuk Dampak Nyata

Arsitektur kelembagaan pembinaan yang kami bangun di BP3U dirancang secara sistemik dan berjenjang, mulai dari tingkat pusat yang berkoordinasi langsung dengan Presiden PKS, tingkat wilayah melalui Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), hingga tingkat daerah melalui Majelis Pertimbangan Daerah (MPD). Harmonisasi struktural ini didukung penuh oleh platform SIM-PP (Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Pejabat) yang terintegrasi di seluruh Indonesia.

SIM-PP menerapkan sistem evaluasi yang berbasis data (data-driven decision system) dan berfokus pada performa riil kader di lapangan. Melalui indikator kinerja yang komprehensif, kami menerapkan metode Monev 360° yang meliputi penilaian internal struktur partai, peer review antarrekan sejawat, hingga umpan balik langsung dari konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada jarak pembatas antara pejabat publik dengan rakyat yang mereka layani.

Lebih jauh lagi, kami meyakini bahwa integritas seorang pejabat publik senantiasa berakar dari lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, melalui pilar Pembinaan Keluarga Pejabat Publik, kami berupaya memperkuat ketahanan domestik keluarga para

> "BP3U secara resmi melahirkan Panduan Pengelolaan Anggota yang Menjadi Pejabat Publik PKS. Ini merupakan sebuah langkah strategis sekaligus bersejarah bagi PKS dalam menegakkan standarisasi integritas, profesionalitas, dan keselarasan gerak kader dengan visi besar nasional partai."

pejabat kita. Pendampingan ini dirancang agar keluarga mampu menjadi pilar penyokong moral yang kokoh, senantiasa mengingatkan pada kejujuran, dan menjaga benteng integritas dari godaan penyimpangan kekuasaan.

Menuju Indonesia Mandiri

Kedaulatan dan kemandirian bangsa bukanlah sebuah hadiah cuma-cuma yang akan diberikan oleh kekuatan global kepada kita. Kedaulatan harus diperjuangkan sejengkal demi sejengkal melalui regulasi yang berpihak pada rakyat, kerja keras yang konsisten, dan kehadiran kepemimpinan daerah yang visioner.

Mari kita jadikan momentum pasca Milad ke-24 PKS ini sebagai tonggak untuk merapatkan barisan, menyatukan langkah, dan memperkokoh khidmat kita kepada bangsa. Kepada seluruh kepala daerah, pimpinan dewan, dan Anggota Legislatif PKS di mana pun Anda bertugas: ingatlah bahwa di tangan andalah marwah dan harapan rakyat dititipkan. Mari kita pastikan bahwa setiap tanda tangan kebijakan yang kita buat, setiap rupiah APBD yang kita anggarkan, dan setiap peraturan daerah yang kita lahirkan senantiasa bernapaskan keadilan sosial demi mengembalikan hak kedaulatan sejati ke tangan rakyat Indonesia.

Selamat berkhidmat,
selamat berjuang!

BADAN PEMBINAAN PEJABAT PUBLIK
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PKS

1 JUNI

HARI KELAHIRAN PANCASILA

PANCASILA PEMERSATU BANGSA,
FONDASI PERDAMAIAN DUNIA.

2

Fondasi Pemikiran & Milad 24 PKS

Refleksi Milad 24 PKS

Dua Puluh Empat Tahun Berkhidmat: Konsistensi PKS dalam Mewujudkan Indonesia Berdaulat

Oleh: | **Dr. H. Almuzzammil Yusuf**
Presiden PKS

Dua Puluh Empat Tahun Istiqomah Melayani

Dua puluh empat tahun bukanlah waktu yang singkat dalam panggung politik Republik Indonesia. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), perjalanan ini adalah sebuah bentangan sejarah yang sarat akan keringat perjuangan, air mata pengorbanan, dan kesetiaan yang tak pernah luntur pada cita-cita para

pendiri bangsa. Sejak awal berdiri, partai ini telah menambatkan jangkar perjuangannya pada satu prinsip yang kokoh: menjadi pelayan rakyat.

Milad ke-24 ini bukan sekadar seremoni seremonial atau panggung konsolidasi kekuasaan internal. Di tengah guncangan ekonomi dunia, krisis geopolitik, dan ancaman krisis pangan serta energi global, Milad ke-24 PKS harus diletakkan sebagai momentum kebangkitan gerakan nyata. Ini adalah saat di mana kita meredefinisi arti khidmat partai ke dalam aksi-aksi konkret yang langsung menyentuh ketahanan hidup rakyat di tingkat akar rumput.

Momentum Gerakan Ketahanan Pangan, Energi, dan Ekonomi

Dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan geopolitik di Eropa dan Timur Tengah telah mengganggu rantai pasokan global, memicu inflasi, dan melambungkan harga-harga kebutuhan pokok. Ditambah lagi dengan anomali iklim ekstrem yang melahirkan kegagalan panen di berbagai belahan dunia. Kondisi global yang penuh ketidakpastian ini menuntut semua elemen bangsa—terutama partai politik—untuk tidak tinggal diam di menara gading kekuasaan.

Oleh karena itu, PKS menetapkan Milad ke-24 sebagai Pintu Masuk Gerakan Ketahanan Pangan, Energi, dan Ekonomi. Kami meyakini bahwa kedaulatan sebuah negara diuji dari kemampuannya dalam memenuhi isi piring rakyatnya sendiri dan menyalakan lampu-lampu di rumah mereka dengan kekuatan mandiri.

Bagi PKS, gerakan ini harus bersifat semesta dan melibatkan seluruh struktur partai dari tingkat pusat hingga ranting di pedesaan:

1. **Gerakan Kedaulatan Pangan:**
   PKS mendorong seluruh kader, simpatisan, dan pejabat publik di daerah untuk mempelopori pemanfaatan lahan pekarangan, penguatan sistem pertanian organik keluarga, dan pembentukan lumbung hidup di tingkat desa. Kita harus menolak ketergantungan mutlak pada pangan impor yang

Melalui momentum Milad ke-24 ini, saya menyerukan kepada seluruh kader dan pejabat publik PKS di seluruh penjuru tanah air: mari kita turun ke lapangan, merangkul para petani, berkolaborasi dengan para nelayan, dan membina para pelaku UMKM.

hanya memperkaya para pemburu rente asing dan memiskinkan petani lokal.

2. **Gerakan Kedaulatan Energi:** Kita harus mulai menggeser paradigma penggunaan energi fosil kotor ke arah pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis komunitas. Kader-kader PKS di daerah harus menjadi inisiator dalam mengoptimalkan potensi lokal, seperti mikrohidro, biogas pedesaan, dan panel surya mandiri demi tercapainya keadilan ekologis.
3. **Gerakan Kedaulatan Ekonomi:** Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah soko guru ekonomi nasional. PKS berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan madani melalui pembinaan koperasi-koperasi pertanian dan usaha bersama yang terbebas dari jerat transaksi ribawi serta lintah darat.

Meneguhkan Konsistensi dan Mengikis Kesenjangan

Konsistensi adalah modal politik terbesar PKS. Selama dua puluh empat tahun, PKS terus berupaya menjaga integritas moral dan kedekatan dengan konstituen. Di saat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin kian melebar akibat sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif, PKS hadir sebagai jembatan keadilan sosial.

Kami menyadari bahwa perjuangan mewujudkan Indonesia

yang berdaulat secara ekonomi, pangan, dan energi tidak bisa hanya mengandalkan retorika di ruang sidang DPR atau dokumen teknokratis pemerintah. Kebijakan nasional yang tertuang dalam misi Asta Cita atau rencana pembangunan jangka menengah tidak akan ada gunanya jika di lapangan rakyat masih kesulitan mendapatkan pupuk murah, solar untuk nelayan masih langka, dan harga gabah petani lokal terus ditekan oleh masuknya beras impor.

Di sinilah peran penting dari seluruh jajaran pengurus, kader, kepala daerah, dan Anggota Legislatif PKS di seluruh Indonesia. Anda semua adalah pelayan rakyat yang sesungguhnya. Setiap kebijakan daerah yang kita perjuangkan harus diarahkan untuk mendukung kemandirian lokal, menghentikan dominasi asing yang ekstraktif, dan mengalirkan perputaran uang kembali ke pedesaan melalui program-program berbasis kerakyatan.

Menyongsong Fajar Kedaulatan

Dua puluh empat tahun adalah bukti cinta kita kepada ibu pertiwi. Cinta yang tidak diukur dari seberapa keras kita berteriak di panggung-panggung kekuasaan, melainkan dari seberapa konsisten kita memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang kelaparan di bawah kolong langit Republik ini.

Melalui momentum Milad ke-24 ini, saya menyerukan kepada seluruh kader dan pejabat publik PKS di seluruh penjuru tanah air: mari kita turun ke lapangan, merangkul para petani, berkolaborasi dengan para nelayan, dan membina para pelaku UMKM. Mari kita jadikan struktur partai kita di seluruh tingkatan sebagai posko-posko solusi bagi kesulitan hidup rakyat.

> Konsistensi adalah modal politik terbesar PKS. Selama dua puluh empat tahun, PKS terus berupaya menjaga integritas moral dan kedekatan dengan konstituen. Di saat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin kian melebar akibat sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif, PKS hadir sebagai jembatan keadilan sosial.

Perjalanan menuju Indonesia yang mandiri, adil, berdaulat, dan berkepribadian memang tidak mudah. Namun, dengan kebersamaan, gotong royong, dan rida Allah Subhanahu wa Ta'ala, PKS siap terus melangkah di garda terdepan sebagai lokomotif perubahan untuk mengembalikan marwah bangsa dari desa hingga ke pusat.

Selamat Milad ke-24 PKS. Teruslah berkhidmat, teruslah melayani!

PKS

MILAD BERDAYA

24th

20 April 2002 - 20 April 2026

BERSAMA RAKYAT MENGUATKAN KETAHANAN INDONESIA

Ekonomi Pangan Energi

Visi Kedaulatan Bangsa

Menyongsong Indonesia Emas dengan Kemandirian Pangan dan Energi

Oleh: | **Mohamad Sohibul Iman, Ph. D**
Ketua Majelis Syura PKS

Memaknai Ulang Hakikat Kemerdekaan

Setiap kali kita memperingati milad gerakan dan menatap peta jalan menuju "Indonesia Emas 2045", sebuah pertanyaan fundamental harus selalu kita ajukan ke dalam sanubari kebangsaan kita: Apakah kita telah benar-benar merdeka secara hakiki, ataukah kita masih terjebak dalam belenggu ketergantungan yang tidak kasat mata? Falsafah kemerdekaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita bukanlah sekadar perpindahan kekuasaan administratif dari tangan penjajah ke tangan anak bangsa. Lebih dari

itu, merdeka adalah tegaknya kedaulatan di atas tanah, air, dan udara milik kita sendiri.

Dalam sejarah perjuangan bangsa, terdapat satu benang merah yang menyatukan seluruh elemen pejuang, baik dari kalangan nasionalis maupun Islam. Mereka bersepakat bahwa fondasi utama dari sebuah negara yang bermartabat adalah kemandirian ekonomi yang bertumpu pada kedaulatan pangan dan energi. Kita tidak akan pernah bisa melangkah dengan kepala tegak di panggung internasional jika untuk mengisi piring rakyat dan menyalakan listrik di rumah-rumah mereka, kita masih harus menanti belas kasihan dan impor dari bangsa lain.

Menyongsong Indonesia Emas 2045, kita harus membebaskan diri dari mentalitas terjajah tersebut. Visi kedaulatan pangan dan energi yang diusung oleh PKS bukanlah gerakan isolasionisme yang antipati terhadap dunia luar, melainkan sebuah penegasan sikap bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, mandiri, dan bermartabat.

Pilar Kedaulatan Pangan: Menghidupkan Jiwa Agraris Bangsa

Pemimpin besar revolusi Indonesia, Soekarno, dalam pidatonya yang monumental saat peletakan batu pertama gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor pada tahun 1952, menegaskan dengan kalimat yang sangat lugas:

"Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka malapetaka lah yang akan terjadi."

Pernyataan Bung Karno ini bukanlah sekadar peringatan teknokratis mengenai ketahanan pangan, melainkan sebuah aksioma geopolitik. Ketika sebuah bangsa kehilangan kemampuan untuk memberi makan rakyatnya sendiri, pada saat itulah marwah dan kedaulatannya sedang digadaikan.

Sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir, kita melihat arah kebijakan pangan nasional kerap terjebak dalam pragmatisme jangka pendek. Kebijakan impor pangan yang masif sering kali diambil dengan dalih stabilitas harga pasar, namun mengabaikan kehancuran sistematis yang dialami oleh para petani gurem di pedesaan.

Dalam perspektif Islam, tanah dan pertanian memiliki dimensi spiritualitas yang mendalam. Tokoh pemikir Islam dan pahlawan nasional, Mohammad Natsir, pernah menuliskan refleksi yang senada mengenai pentingnya

kemandirian ekonomi pedesaan. Beliau mengingatkan bahwa kemerdekaan politik hanyalah sebuah "jembatan emas" yang di seberangnya kita harus membangun kemandirian ekonomi rakyat yang nyata. Bagi Natsir, kedaulatan ekonomi tidak boleh memisahkan antara pembangunan material dan moral spiritual. Pertanian yang mandiri adalah wujud syukur ekologis atas karunia tanah subur yang diberikan Allah SWT kepada ibu pertiwi.

Kita harus mengembalikan marwah petani kita. Kedaulatan pangan (food sovereignty) harus ditegakkan dengan cara memberikan hak atas tanah bagi penggarap, menyediakan akses teknologi pertanian yang ramah lingkungan, serta membangun ekosistem perdagangan yang adil dari hulu ke hilir. Desa harus kembali menjadi pusat produksi, bukan sekadar penonton dari derasnya arus konsumsi perkotaan.

Pilar Kedaulatan Energi: Meloloskan Diri dari Imperialisme Gaya Baru

Jika pangan adalah penjaga fisik kehidupan rakyat, maka energi adalah darah yang mengalirkan denyut nadi

peradaban modern. Hari ini, kemandirian energi kita berada di bawah ancaman nyata akibat penurunan produksi migas domestik dan ketergantungan kita pada impor komoditas energi fosil global.

Pada saat yang sama, kita dihadapkan pada dilema hilirisasi pertambangan mineral yang mengorbankan aspek ekologis demi pertumbuhan komersial sesaat. Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara mandiri (captive coal) yang masif di sekitar smelter mineral strategis telah menciptakan kontradiksi besar. Kita mengklaim sedang mendukung transisi energi hijau dunia, namun proses produksinya justru meninggalkan jejak emisi karbon yang tinggi dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat lingkar tambang.

Di sinilah kita perlu merenungkan kembali wejangan bijak dari Mohammad Hatta, sang arsitek demokrasi ekonomi Indonesia. Bung Hatta selalu menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945). Bung Hatta menulis:

"Kedaulatan rakyat harus ditegakkan di atas kedaulatan pasar. Sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh diserahkan kepada keserakahan modal swasta, apalagi asing, melainkan harus dikelola secara gotong royong melalui alat negara dan koperasi."

Mengelola energi secara berdaulat berarti kita harus memiliki keberanian politik untuk melakukan transisi energi hijau yang berkeadilan (green developmentalism). Kita harus menghentikan kecenderungan eksploitasi ekstraktif yang mengorbankan ruang hidup rakyat. Daerah-daerah di Indonesia harus didorong dan diberi wewenang untuk mengembangkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) skala lokal, seperti mikrohidro, panas bumi, dan tenaga surya secara mandiri. Ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk menjaga kelestarian bumi (hifzhul bi'ah) sekaligus memastikan pasokan energi yang murah dan berkelanjutan bagi rakyat jelata.

"Kedaulatan rakyat harus ditegakkan di atas kedaulatan pasar. Sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh diserahkan kepada keserakahan modal swasta, apalagi asing, melainkan harus dikelola secara gotong royong melalui alat negara dan koperasi."

~ Muhammad Hatta

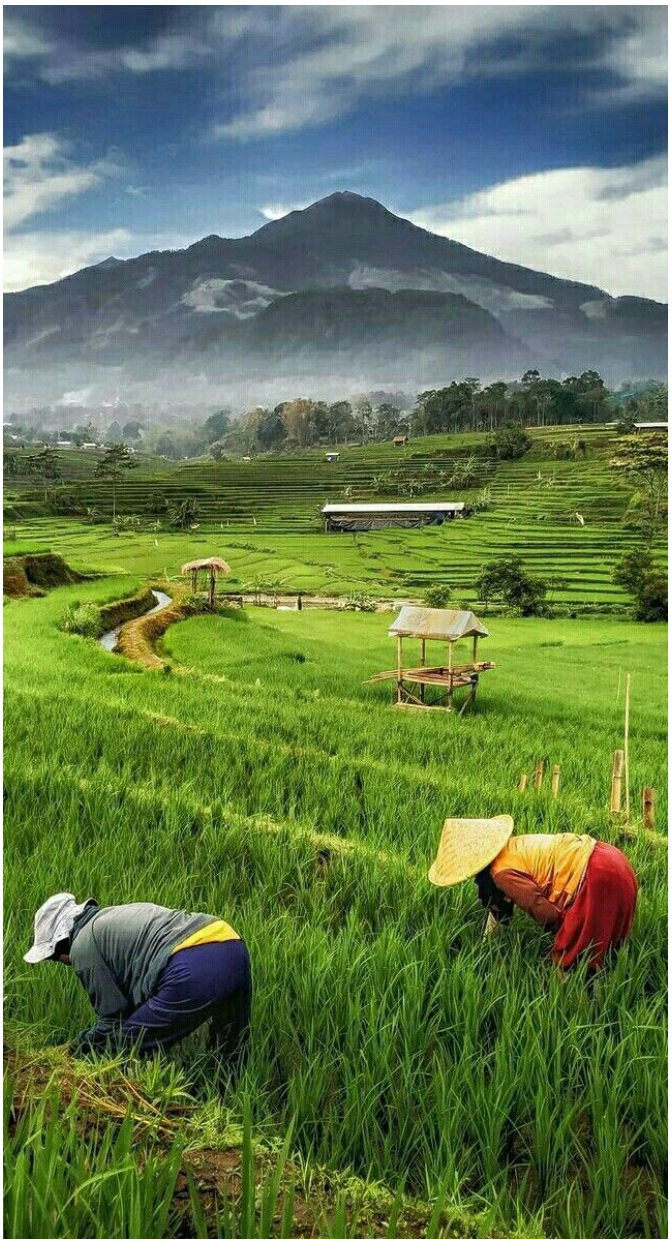

Menyatukan Visi Nasionalis-Religius untuk Indonesia Emas

Sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia hanya akan kokoh berdiri apabila dua kekuatan utama bangsanya, yaitu kaum Nasionalis dan kaum Religius (Islam), bergerak dalam satu keselarasan visi. Sinergi teologis-kebangsaan ini merupakan modal sosial terbesar yang kita miliki.

Ulama dan cendekiawan karismatik Nusantara, Buya Hamka, dalam karya-karyanya selalu menekankan pentingnya kemerdekaan jiwa sebelum membangun kemerdekaan fisik. Hamka mengingatkan bahwa jiwa yang terjajah adalah jiwa yang selalu merasa inferior di hadapan kekuatan asing, selalu merasa bahwa produk luar lebih baik, dan selalu bergantung pada belas kasihan bangsa lain.

Menyongsong Indonesia Emas 2045, kita harus membebaskan diri dari mentalitas terjajah tersebut. Visi kedaulatan pangan dan energi yang diusung oleh PKS bukanlah gerakan isolasionisme yang antipati terhadap dunia luar, melainkan sebuah penegasan sikap bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, mandiri, dan bermartabat.

Melalui momentum refleksi Milad ke-24 PKS ini, saya mengajak kepada seluruh pejabat publik, pimpinan daerah, legislatur, dan segenap kader partai di seluruh penjuru tanah air: mari kita jadikan setiap otoritas kebijakan yang kita miliki sebagai alat untuk membela hak-hak ekonomi rakyat.

Mari kita pastikan bahwa tidak ada sejengkal pun tanah subur kita yang diterlantarkan, dan tidak ada satu watt pun energi listrik di rumah rakyat yang bersumber dari ketidakadilan ekologis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai ikhtiar kita dalam menjaga marwah dan kedaulatan bangsa ini dari desa hingga ke pusat kekuasaan.

Nashrun minallahi wa fathun qarib. Selamat berkhidmat!

Kepemimpinan Pejabat Publik

Kepemimpinan Strategis di Era Krisis Global: Membangun Resiliensi Ekonomi Daerah

Oleh: | **Reza Falepi, S.T., M.T.**
Walikota Payakumbuh 2 Periode,
dan Ketua Deputi BP3U DPP PKS

Pendahuluan: Ketika Badai Global Mengetuk Pintu Daerah

Dunia hari ini tidak lagi mengenal sekat yang rigid. Guncangan geopolitik di belahan bumi lain, eskalasi konflik di Eropa Timur, hingga kebijakan proteksionisme pangan yang diterapkan negara-negara produsen utama, seketika bertransformasi menjadi badai inflasi yang menghantam daya beli ibu-ibu di pelosok desa kita. Paradoks era disrupsi global (VUCA Era) mengajarkan kita satu hal: krisis makroekonomi tidak pernah tinggal di

awang-awang; ia selalu mendarat dan memukul sektor mikro di tingkat daerah terlebih dahulu.

Di sinilah letak ujian kepemimpinan modern. Menghadapi krisis multidimensi ini, kepemimpinan pejabat publik di daerah tidak boleh lagi sekadar bersifat administratif-birokratis. Kita tidak bisa lagi memimpin dengan cara business as usual. Kepala daerah dan para legislator daerah dituntut memiliki cakrawala berpikir global, namun dengan ketangkasan bertindak yang sangat membumi (think globally, act locally). Membangun resiliensi (daya lentur) ekonomi daerah adalah satu-satunya benteng pertahanan agar ketidakpastian global tidak runtuh menjadi bencana sosial di daerah kita.

Membaca Anatomi Krisis dan Kerentanan Domestik

Membangun resiliensi menuntut kejujuran intelektual untuk memetakan kerentanan struktural yang ada. Di sektor energi, kita dihadapkan pada kenyataan merosotnya produksi migas nasional yang berujung pada ketergantungan impor LPG yang luar biasa tinggi. Di sektor pangan, ketahanan kita rapuh karena tata niaga yang cenderung bercorak neoliberal—lebih mengandalkan kestabilan harga jangka pendek lewat impor ketimbang berinvestasi pada kedaulatan produsen lokal.

Ketika harga energi fosil dunia melonjak, atau ketika pasokan pupuk terganggu akibat rantai pasok global yang macet, daerah yang tidak memiliki ketahanan mandiri akan langsung lumpuh. Petani gurem kita menderita karena ongkos produksi yang membubung tak sebanding dengan harga jual gabah yang ditekan oleh pasar.

Kepemimpinan strategis harus mampu memutus ketergantungan sistemik ini. Kita tidak bisa mengubah kebijakan makro dunia dalam semalam, tetapi kita memiliki otoritas penuh untuk merancang ekosistem perlindungan ekonomi di tingkat lokal. Resiliensi ekonomi daerah adalah kemampuan sebuah wilayah untuk mengantisipasi gejolak eksternal, meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat rentan, dan dengan cepat memulihkan diri melalui pemanfaatan seluruh potensi domestik secara mandiri.

"Resiliensi ekonomi daerah adalah kemampuan sebuah wilayah untuk mengantisipasi gejolak eksternal, meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat rentan, dan dengan cepat memulihkan diri melalui pemanfaatan seluruh potensi domestik secara mandiri."

Pejabat Publik sebagai 'Dirigen' Resiliensi Daerah

Merujuk pada Panduan Pengelolaan Pejabat Publik PKS, seorang pemimpin di sektor publik harus mengidentifikasi dirinya bukan sebagai penguasa tunggal, melainkan sebagai seorang "Dirigen Kedaulatan". Seperti dirigen dalam simfoni, ia tidak menghasilkan suara dari instrumennya sendiri, melainkan mengorkestrasikan berbagai potensi yang ada—mulai dari birokrasi, pelaku usaha lokal, koperasi, kelompok tani, hingga institusi akademik—menjadi satu harmoni gerakan penyelamatan ekonomi.

Untuk memimpin simfoni resiliensi ini, pejabat publik wajib bersandar pada tiga pilar karakter utama:

1. **Bersih:** Integritas adalah modal sosial terbesar dalam kepemimpinan. Dalam situasi krisis, setiap rupiah APBD dan setiap kebijakan alokasi bantuan (seperti pupuk bersubsidi atau solar untuk nelayan) harus dikawal secara ketat agar bebas dari pemburu rente lokal. Pemimpin yang bersih memangkas biaya transaksi ekonomi yang tidak perlu (high-cost economy), sehingga iklim usaha mikro di daerah dapat tumbuh secara sehat dan kompetitif.
2. **Peduli:** Resiliensi tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan PDRB yang dingin di atas kertas. Peduli berarti memiliki kepekaan sensorik untuk turun ke pasar tradisional, mendengarkan keluhan

petani yang gagal panen, dan segera merumuskan kebijakan afirmatif. Kepedulian melahirkan kebijakan taktis berupa jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan intervensi pasar yang cepat saat inflasi mulai mengancam perut rakyat.

3. **Profesional Negarawan:** Membangun daerah membutuhkan kecerdasan teknokratis yang dipandu oleh visi jangka panjang. Pejabat publik harus profesional dalam mengelola keuangan daerah, memaksimalkan pendapatan asli daerah tanpa mencekik pelaku usa-ha kecil, serta memiliki keberanian politik untuk menolak pola pembangun-an ekstraktif yang merusak lingkungan demi mengejar pertumbuhan instan.

Mengaktualisasikan Ekonomi Pancasila Melalui BUMDes dan Koperasi

Bagaimanakah wujud nyata dari resiliensi ekonomi daerah tersebut? Kita harus kembali pada soko guru perekonomian kita yang digagas oleh Mohammad Hatta: Koperasi dan asas gotong royong, yang kemudian dilembagakan oleh Prof. Mubyarto dalam gagasan Sistem Ekonomi Pancasila.

Di tingkat daerah, kepemimpinan strategis diwujudkan dengan membangun Ekosistem Ekonomi Madani melalui revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Pertanian lokal.

- **Memotong Rantai Tengkulak:** Pemimpin daerah harus berani memposisikan BUMDes atau koperasi sebagai agregator hasil panen rakyat. Dengan sistem off-taker (penjamin pembelian) lokal, petani mendapatkan jaminan harga yang layak di atas biaya produksi mereka, sementara konsumen di perkotaan mendapatkan harga pangan yang stabil. Ini adalah esensi dari keadilan distributif Ekonomi Pancasila.
- **Membangun Kemandirian Energi Komunitas:** Resiliensi ekonomi tidak lengkap tanpa kemandirian energi. Kepala daerah harus mempelopori pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) skala mikro berbasis komunitas. Pembangunan instalasi biogas dari limbah ternak

"Pemimpin daerah harus berani memposisikan BUMDes atau koperasi sebagai agregator hasil panen rakyat. Dengan sistem off-taker (penjamin pembelian) lokal, petani mendapatkan jaminan harga yang layak di atas biaya produksi mereka, sementara konsumen di perkotaan mendapatkan harga pangan yang stabil."

Krisis global di depan mata kita bukanlah alasan untuk menyerah pada keadaan, melainkan panggung bagi kita untuk membuktikan bahwa nilai-nilai keadilan sosial, kemandirian, dan gotong royong yang kita bawa adalah solusi nyata bagi kehidupan rakyat.

pedesaan, mikrohidro di aliran sungai, atau panel surya komunal tidak hanya membebaskan daerah dari ketergantungan listrik fosil berbiaya tinggi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi anak-anak muda di desa.

- **Integrasi WEF (Water, Energy, Food) Nexus:** Kepemimpinan yang visioner memahami bahwa urusan air, energi, dan pangan saling mengunci. Jangan sampai ada kebijakan konversi lahan subur demi proyek energi industri skala besar yang justru merusak sumber air pertanian. Pemimpin daerah harus mengguna-kan pendekatan berbasis data ilmiah untuk menyinkronkan penggunaan lahan agar kedaulatan pangan dan kelestarian ekologis berjalan beriringan.

Penutup: Mengembalikan Daulat Rakyat dari Daerah

Sejarah peradaban membuktikan bahwa ketahanan sebuah bangsa tidak diukur dari megahnya gedung-gedung pencakar langit di ibu kota, melainkan dari daya tahan desa-desanya dalam menghadapi masa-masa sulit. Ketika desa-desa kita berdaulat secara pangan, mandiri secara energi, dan tangguh secara ekonomi, maka dengan sendirinya Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak mudah didikte oleh kekuatan global manapun.

Kepada rekan-rekan pejabat publik, kepala daerah, dan Anggota Legislatif PKS di seluruh penjuru tanah air: amanah yang Anda pegang hari ini adalah alat perjuangan sejarah. Krisis global di depan mata kita bukanlah alasan untuk menyerah pada keadaan, melainkan panggung bagi kita untuk membuktikan bahwa nilai-nilai keadilan sosial, kemandirian, dan gotong royong yang kita bawa adalah solusi nyata bagi kehidupan rakyat.

Mari kita pimpin daerah kita masing-masing dengan kebersihan hati, kepedulian yang nyata, dan profesionalitas seorang negarawan. Dari daerah, kita bangun resiliensi; dari daerah, kita tegakkan kembali kedaulatan dan marwah Republik Indonesia.

Kajian Ideologis

Reorientasi Teoretis Ekonomi Pancasila & Epistemologi Sosialisme Islam: Melacak Akar Kedaulatan Ekonomi dari Bung Hatta, Mubyarto, hingga Tjokroaminoto

Oleh: Tim Redaksi Sinergi

Pendahuluan: Krisis Paradigmatik Ekonomi Indonesia

Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan ancaman krisis ekologi abad ke-21, Indonesia hari ini dihadapkan pada sebuah paradoks pembangunan yang mencolok (Kementerian PPN/ Bappenas, 2025). Perekonomian nasional mencatatkan angka pertumbuhan yang konstan, namun di tingkat akar rumput, ketimpangan kepemilikan aset, kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri ekstraktif seperti pembangkit batubara mandiri (captive coal), serta

ketergantungan kronis pada komoditas pangan impor terus menggerogoti kedaulatan bangsa (Ember, 2025). Realitas empiris ini menunjukkan adanya ketidakselarasan struktural yang mendalam dalam model pembangunan kita.

Upaya melepaskan diri dari ketergantungan asing tidak boleh hanya didekati secara teknokratis-pragmatis, melainkan harus dimulai dari ranah ideologis. Selama berdekade-dekade, arsitektur kebijakan ekonomi kita didominasi oleh paradigma pembangunan kapitalistik-neoliberal yang menempatkan pertumbuhan material di atas keadilan sosial dan kelestarian ekologis.

Untuk memulihkan haluan ekonomi Indonesia sesuai mandat konstitusi, kita perlu melakukan dekonstruksi kritis dan menoleh kembali pada tiga pilar pemikiran ekonomi pribumi: konsep Koperasi dan Paham Kerakyatan Mohammad Hatta (Hatta, 1963), Sistem Ekonomi Pancasila Mubyarto (Mubyarto, 1981), serta epistemologi Sosialisme Islam yang dipelopori oleh H.O.S. Tjokroaminoto dan diaktualisasikan oleh Syafruddin Prawiranegara (Tjokroaminoto, 1924; Prawiranegara, 1953). Ketiga kerangka pemikiran ini menawarkan landasan moral dan operasional yang kokoh untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi dari cengkeraman pasar bebas ke tangan rakyat.

"Selama berdekade-dekade, arsitektur kebijakan ekonomi kita didominasi oleh paradigma pembangunan kapitalistik-neoliberal yang menempatkan pertumbuhan material di atas keadilan sosial dan kelestarian ekologis."

1. Rekonstruksi Demokrasi Ekonomi Bung Hatta: Koperasi sebagai Soko Guru dan Kemitraan Syirkah

Mohammad Hatta menetapkan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan politik, melainkan emansipasi ekonomi rakyat dari belenggu sistem kolonial-kapitalistik (Hatta, 1963). Dalam pandangan beliau, kapitalisme secara inheren menghasilkan konsentrasi kekayaan pada segelintir elite pemodal dan memarjinalkan mayoritas kaum pribumi. Oleh karena itu, Bung Hatta merekonstruksi gerakan koperasi sebagai bangun usaha yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Bung Hatta melihat bahwa masyarakat asli Indonesia memiliki sistem sosial komunal yang berbasis pada kolektivisme, gotong royong, dan tradisi tolong-menolong. Koperasi, dalam formulasi Hatta, bukanlah sekadar badan hukum pencari laba materiil (profit-oriented), melainkan sebuah wadah perjuangan sosial untuk

membangun budi pekerti, solidaritas, tanggung jawab moral, dan membela hak-hak ekonomi golongan ekonomi lemah (Hatta, 1963).

Dalam perspektif ekonomi syariah modern, konsep koperasi Bung Hatta yang mengedepankan kebersamaan memiliki titik temu yang sempurna dengan akad Syirkah (Muslim, 2021). Akad syirkah adalah bentuk kemitraan usaha antara dua pihak atau lebih dalam hal permodalan, keahlian, dan kepercayaan, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal ($profit\ and\ loss\ sharing$).

Dengan mengintegrasikan nilai moral ini, koperasi tidak hanya menjadi pilar ekonomi rakyat yang tangguh, tetapi juga membersihkan diri dari praktik ribawi dan ketidakjelasan akad (gharar) yang menjadi watak dasar lembaga keuangan konvensional. Koperasi bertindak sebagai instrumen redistribusi kemakmuran yang meruntuhkan hegemoni korporasi transnasional dan tengkulak di sektor hulu-hilir pertanian.

2. Pelembagaan Etika Mubyarto: Sistem Ekonomi Pancasila dan Manusia Moralis

Gagasan demokrasi ekonomi Bung Hatta selanjutnya dikembangkan secara akademis oleh Prof. Mubyarto menjadi teori sistematis yang dikenal sebagai Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) (Mubyarto, 1981). Mubyarto melayangkan kritik keras terhadap kurikulum dan kebijakan ekonomi nasional yang terlalu berkiblat pada

mazhab neoklasik Barat. Mazhab tersebut mendasarkan teorinya pada asumsi bahwa manusia adalah homo economicus—makhluk rasional egois yang tindakan ekonominya semata-mata dimotivasi oleh pemaksimalan kepuasan materiil individu secara tak terbatas (Mubyarto, 1997).

Sebagai alternatif, SEP mengajukan konsep Manusia Moralis (Mubyarto, 2002). Perilaku berekonomi warga negara tidak hanya digerakkan oleh rangsangan materiil, melainkan oleh perpaduan yang seimbang antara rangsangan materiil, sosial, moral, dan etika keagamaan. Filsafat SEP bersandar utuh pada kelima sila Pancasila yang saling menjiwai sebagai satu kesatuan filosofis (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2024).

> Melacak kembali akar pemikiran Mohammad Hatta, Mubyarto, Tjokroaminoto, dan Syafruddin Prawiranegara memberikan kita sebuah konklusi penting: kemandirian nasional tidak akan pernah tercapai selama kita masih mempertahankan paradigma ekonomi yang mengabaikan moralitas, ketuhanan, dan keadilan sosial."

Mubyarto (2002) merumuskan lima ciri utama Sistem Ekonomi Pancasila:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral keagamaan.
2. Kehendak kuat seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (menolak monopoli kekayaan).
3. Prioritas utama diletakkan pada nasionalisme ekonomi demi ketahanan nasional yang mandiri.
4. Koperasi diakui sebagai pilar utama dan soko guru perekonomian rakyat.
5. Kebijakan pembangunan dikelola secara desentralistik guna menjaga keseimbangan kemajuan antardaerah.

Dalam implementasi kebijakan modern, khususnya pada perancangan APBN dan tata kelola investasi strategis nasional, Ekonomi Pancasila menuntut peran intervensi negara yang kuat dan bijaksana. Negara, melalui pembentukan badan pengelola investasi terpadu seperti Danantara serta optimalisasi BUMN/BUMD, harus memastikan bahwa penguasaan cabang-cabang produksi penting serta sumber daya alam strategis (sesuai Pasal 33 UUD 1945) tetap berada di bawah kendali publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat jelata, bukan diserahkan pada mekanisme pasar bebas atau investasi asing yang eksploitatif (Kementerian Keuangan, 2026).

3. Epistemologi Sosialisme Islam: Dari Tauhid Tjokroaminoto hingga Pragmatisme Syafruddin

sAkar perjuangan ekonomi kerakyatan di Indonesia diperkaya secara mendalam oleh tradisi pemikiran Sosialisme Islam. Peletak dasar gagasan ini adalah Hadji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto melalui adikaryanya, Islam dan Sosialisme (1924). Gagasan ini dirumuskan sebagai respons kritis terhadap dominasi kapitalisme kolonial Belanda sekaligus menjadi benteng ideologis di internal Sarekat Islam (SI) guna menangkal infiltrasi komunisme Marxis yang ateistik (Tjokroaminoto, 1924).

Tjokroaminoto menegaskan bahwa cita-cita keadilan sosial, kesetaraan tanpa kelas, dan persaudaraan kemanusiaan telah terkandung secara sempurna di dalam syariat Islam yang diturunkan sejak tiga belas abad silam (Tjokroaminoto, 1924). Terdapat perbedaan garis demarkasi yang tebal antara Sosialisme Islam dan Sosialisme Marxis:

- Sosialisme Marxis bersandarkan pada historis materialisme yang memandang bahwa materi merupakan muasal sekaligus tujuan akhir dari segala perubahan sosial, dan menghalalkan segala cara melalui pertentangan kelas.

- Sosialisme Islam berakar teguh pada prinsip Tauhid (keimanan kepada Allah SWT) yang menetapkan akhirat sebagai orientasi hidup dan menjamin kebebasan individu selama tidak melanggar keadilan umum dan kemaslahatan sosial.

Tjokroaminoto (1924) menjabarkan tiga pilar kedermawanan sosialistis Islam:

1. **Altruisme spiritual**: Membangun keridaan individu untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kemaslahatan masyarakat umum.
2. **Redistribusi kekayaan wajib:** Pembagian kemakmuran secara merata melalui instrumen Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).
3. **Pelarangan mutlak atas Riba:** Mengharamkan tindakan mengambil keuntungan sepihak di atas penderitaan orang lain tanpa adanya kerja keras yang adil. Tjokroaminoto juga menekankan pentingnya reforma agraria dengan mengembalikan kepemilikan tanah kepada para petani yang menggarapnya secara langsung.

Epistemologi ini kemudian diaktualisasikan ke dalam kebijakan ekonomi makro pascakemerdekaan oleh Syafruddin Prawiranegara melalui konsep "Sosialisme Religius" (Prawiranegara, 1953). Selaku pengambil kebijakan keuangan dan moneter, Syafruddin menyintesis prinsip kemanusiaan dari sosialisme demokratis dengan nilai spiritualitas

> "Koperasi, dalam formulasi Hatta, bukanlah sekadar badan hukum pencari laba materiil (profit-oriented), melainkan sebuah wadah perjuangan sosial untuk membangun budi pekerti, solidaritas, tanggung jawab moral, dan membela hak-hak ekonomi golongan ekonomi lemah."

Islam. Syafruddin menekankan bahwa transisi dari ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional yang mandiri membutuhkan stabilitas moneter yang kuat, iklim investasi yang sehat dan adil, serta penempatan sektor pertanian sebagai basis utama pengelolaan kekayaan negara (Prawiranegara, 1953). Moral ekonomi Islam dijadikan dasar pijakan untuk merancang regulasi pasar yang bebas dari penindasan kapitalistik.

4. Sintesis Kritis: Dekonstruksi Kebijakan Pangan dan Energi Kontemporer

Ketika kita menyandingkan realitas pembangunan hari ini dengan kerangka teoritis ekonomi pribumi di atas, kita menemukan adanya ketidakselarasan arah kebijakan yang sangat fundamental:

Isu Sektoral	Realitas Pembangunan Kontemporer (Neoliberal)	Perspektif Ekonomi Pancasila & Sosialisme Islam
Tata Niaga Pangan	Mengutamakan konsep food security (impor komoditas murah dari mana saja) yang merusak harga gabah lokal dan memarjinalkan petani kecil.	Menuntut food sovereignty (kedaulatan pangan) dengan memosisikan petani sebagai subjek utama, didukung redistribusi lahan dan koperasi tani hulu-hilir (Serikat Petani Indonesia, 2024).
Hilirisasi Mineral & Energi	Menoleransi PLTU batubara mandiri (captive coal) demi mengejar pertumbuhan PDB cepat, menciptakan sacrifice zones (polusi ekstrem).	Menolak eksploitasi lingkungan demi keuntungan materiil jangka pendek. Menuntut transisi energi hijau berkeadilan (green developmentalism) berbasis EBT lokal (Ember, 2025).
Sistem Keuangan	Dominasi lembaga keuangan konvensional ribawi yang mempersulit akses modal rakyat kecil dan menjerat petani lewat tengkulak.	Penguatan ekosistem ekonomi syirkah/syariah yang bebas riba melalui penguatan modal koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah (Hatta, 1963; Mubyarto, 2002).

Kesimpulan: Reorientasi Menuju Haluan Baru Indonesia Berdaulat

Melacak kembali akar pemikiran Mohammad Hatta, Mubyarto, Tjokroaminoto, dan Syafruddin Prawiranegara memberikan kita sebuah konklusi penting: kemandirian nasional tidak akan pernah tercapai selama kita masih mempertahankan paradigma ekonomi yang mengabaikan moralitas, ketuhanan, dan keadilan sosial.

Untuk mengembalikan marwah bangsa dari desa hingga ke pusat kekuasaan, Tim Redaksi Sinergi merumuskan tiga rekomendasi kebijakan terintegrasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2025):

1. **Implementasi Reforma Agraria Sejati:** Mendistribusikan lahan secara adil kepada petani penggarap dan memperkuat Koperasi Pertanian sebagai unit pengelola utama distribusi pupuk, penyedia modal kerja bebas riba, serta penyerap hasil panen rakyat.
2. **Transformasi Industri Hijau Berkeadilan:** Menutup celah regulasi pembangunan PLTU captive coal baru di wilayah smelter pertambangan, menerapkan pajak karbon secara tegas, dan mengalihkan pasokan en-ergi ke arah Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis potensi daerah (Ember, 2025).

3. **Pelembagaan WEF (Water, Energy, Food) Nexus**: Menyinkronkan data tunggal yang transparan dan mengintegrasikan keputusan pemanfaatan lahan serta air agar tidak terjadi benturan kepentingan antara industri pertambangan energi dan kedaulatan sektor pertanian pangan nasional (Bappenas, 2024).

Melalui reorientasi teoritis dan praktis ini, para pejabat publik PKS—baik di ranah eksekutif maupun legislatif—memiliki landasan ideologis yang kuat untuk menyusun regulasi dan mengalokasikan anggaran daerah yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak. Hanya dengan kembali pada jalan ekonomi konstitusi inilah, cita-cita Indonesia yang mandiri, adil, berdaulat, dan berkepribadian dapat kita wujudkan bersama.

Daftar Pustaka

- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2024). Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila. Jakarta: BPIP RI.
- Ember. (2025). Policy Paper - From Captive Coal to Green Nickel: Securing Indonesia's Future Competitiveness. Jakarta & London: Ember Energy.
- Hatta, Mohammad. (1963). Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Kementerian Keuangan RI. (2026). Presiden Sampaikan 8 Agenda Prioritas dalam RAPBN. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024). Indonesia Perkuat Integrasi Ketahanan Air-Energi-Pangan Melalui Peta Jalan dan Sistem Pendukung Keputusan (DSS) WEF Nexus. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029: Fondasi Awal Visi Indonesia Emas 2045. Jakarta: Bappenas.
- Mubyarto. (1981). Sistem Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mubyarto. (1997). Filsafat Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM.
- Mubyarto. (2002). Ekonomi Pancasila: Landasan, Karakter, dan Strategi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Muslim, Wiki Reskitulasis. (2021). Konsep Koperasi Menurut Muh. Hatta (Landasan, Karakter, dan Relevansinya). Parepare: IAIN Parepare.
- Prawiranegara, Syafruddin. (1953). Sosialisme Religius: Pidato Kebangsaan dan Pandangan Ekonomi Islam. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Serikat Petani Indonesia (SPI). (2024). Laporan Diskusi Terpimpin: Stop Impor Beras, Pemerintah Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan. Jakarta: DPP SPI.
- Tjokroaminoto, Hadji Oemar Said. (1924). Islam dan Sosialisme. Surabaya: G. Kolff & Co.

BADAN PEMBINAAN PEJABAT PUBLIK
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PKS

SELAMAT

IDUL ADHA

1447 H

Bukan daging atau darahnya,

"Tidaklah daging-daging (hewan qurban) dan darah-darahnya itu sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah **ketakwaanmu.**"

(QS. Al-Hajj: 37)

3

Analisis Struktural & Kebijakan

Analisis Struktural & Kebijakan

Catatan Strategis dari Sarasehan Kepala Daerah PKS: Komitmen Menuju Swasembada Pangan dan Energi di Tingkat Wilayah

Oleh: Tim Redaksi Sinergi

Pendahuluan: Desentralisasi Kedaulatan sebagai Kunci Resiliensi Nasional

Ketika kita berbicara tentang kedaulatan sebuah bangsa, perhatian kita sering kali tertuju pada kebijakan-kebijakan makro yang dirancang di gedung-gedung kementerian di Jakarta. Namun, sejarah dan krisis kontemporer mengajarkan satu hal fundamental: pertahanan dan resiliensi nasional yang sesungguhnya diuji di tingkat daerah. Ketika rantai pasok pangan global terganggu akibat gejolak

geopolitik atau ketika fluktuasi harga energi fosil dunia menekan APBN, daerah-daerah di seluruh pelosok Nusantaralah yang pertama kali merasakan dampaknya secara langsung.

Sarasehan Nasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PKS Tahun 2026 menjadi momentum krusial untuk melokalisasi visi besar kedaulatan bangsa. Dipandu oleh arahan strategis dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Pejabat Publik (BP3U) dan Komisi IV DPR RI, para pemimpin daerah dari PKS menyepakati sebuah draf pakta integritas dan komitmen aksi nyata. Komitmen ini tidak didesain sebagai dokumen administratif yang kaku, melainkan sebagai manifesto politik lokal untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi secara mandiri di wilayah masing-masing, menggunakan pendekatan yang bersih, peduli, dan profesional-negarawan (BP3U DPP PKS, 2026).

1. Kedaulatan Pangan Wilayah: Menolak Impor, Menegakkan Swasembada Lokal

Tata niaga pangan Indonesia saat ini tengah berada dalam perangkap ketergantungan impor akibat pelembagaan konsep food security (ketahanan pangan) yang bias pasar bebas (Serikat Petani Indonesia, 2024). Ketika keran impor dibuka lebar dengan dalih stabilitas harga komoditas jangka pendek, petani gurem lokal di daerah-daerah sentra agraris harus menanggung kerugian akibat anjloknya harga gabah kering di tingkat hulu.

Menyikapi ketimpangan struktural ini, Sarasehan Kepala Daerah PKS merumuskan Aksi Swasembada Pangan Lokal yang bertumpu pada tiga strategi operasional:

- Pembangunan Lumbung Pangan di Kantor Partai: Menindaklanjuti instruksi taktis Milad ke-24 PKS, setiap pengurus wilayah (DPW) dan daerah (DPD) didorong untuk mendirikan lumbung pangan fisik

Sarasehan Kepala Daerah PKS menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh mengorbankan kelestarian ruang hidup rakyat di daerah. Oleh karena itu, para bupati, wali kota, dan legislator PKS di tingkat daerah berkomitmen menjadi pelopor transisi energi bersih skala mikro berbasis komunitas melalui Gerakan Teknologi Surya Tepat Guna:

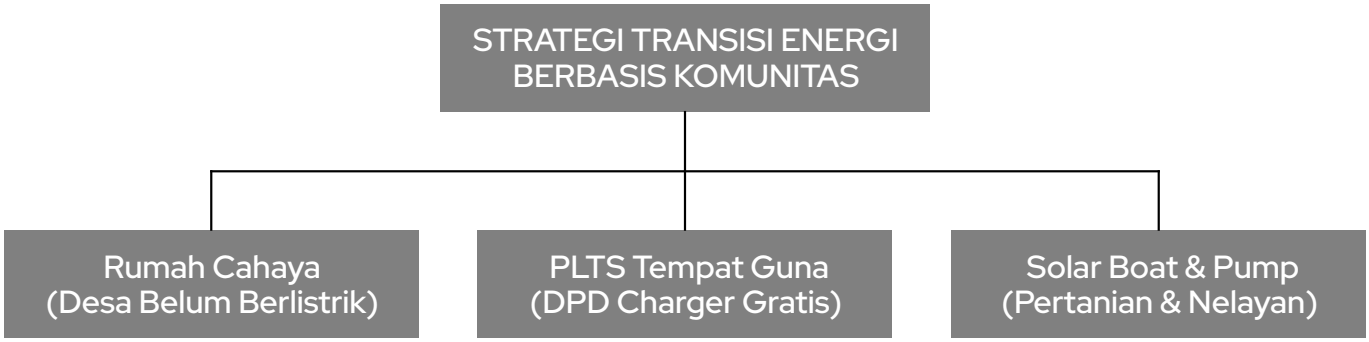

mandiri di kantor-kantor partai (Riyono, 2026). Lumbung ini berfungsi sebagai sistem cadangan pangan darurat masyarakat sekitar saat menghadapi masa paceklik atau lonjakan inflasi harga bahan pokok.

- Sekolah Tani Ternak Nelayan (STTN) Regional: Kepala daerah PKS berkomitmen mengalokasikan anggaran dan memfasilitasi program STTN secara berkala untuk mengedukasi masyarakat mengenai teknik pertanian organik terpadu, pembuatan pupuk alami mandiri guna memotong ketergantungan pada pupuk kimia subsidi yang langka, serta teknik budidaya holtikultura adaptif iklim.
- Program "One UPA One Product" (Satu UPA Satu Produk): Menggerakkan struktur partai hingga level Unit Pembinaan Anggota (UPA) di pedesaan untuk memanfaatkan lahan pekarangan tidur menjadi kawasan produktif penghasil pangan lokal (sayuran, ikan air tawar, umbi-umbian). Ini adalah bentuk nyata membumikan kedaulatan pangan dari unit terkecil keluarga.

2. Kedaulatan Energi Wilayah: Implementasi Transisi Hijau yang Berkeadilan

Sektor energi nasional menghadapi tantangan ganda: ketergantungan impor minyak mentah dan LPG yang kian membubung di tengah penurunan lifting migas domestik, serta kontradiksi ekologis dari proyek hilirisasi mineral yang ditopang oleh energi fosil kotor PLTU batubara mandiri (captive coal) (Ember, 2025).

Sarasehan Kepala Daerah PKS menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh mengorbankan kelestarian ruang hidup rakyat di daerah. Oleh karena itu,

> Membangun kedaulatan pangan dan energi di daerah menuntut sistem pengawasan internal yang sangat ketat guna mencegah terjadinya penyelewengan bantuan publik, monopoli pupuk, atau korupsi proyek EBT lokal oleh mafia pemburu rente.

Struktur Organisasi	Peran Strategis Swasembada Pangan	Peran Strategis Kedaulatan Energi
DPP (Pusat)	Perumusan kebijakan makro budaya pangan lokal & advokasi legislasi nasional.	Sinkronisasi peta jalan transisi energi nasional & kerja sama riset teknologi EBT tepat guna.
DPR RI & Kepala Daerah PKS	Fasilitator utama anggaran APBD/APBN untuk bantuan benih, pupuk, dan reforma agraria lokal.	Sponsor utama regulasi daerah pelarangan PLTU kotor baru & insentif bagi investasi EBT ramah lingkungan.
DPW (Provinsi)	Pembuatan lumbung pangan wilayah & integrasi logistik pangan antarkabupaten.	Pendampingan teknis implementasi PLTS di daerah-daerah terpencil pedalaman.
DPD (Kabupaten /Kota)	Eksekusi "Pasar Kita Semua" (PAKIS) & pembinaan UMKM pangan lokal.	Pemasangan instalasi pengisian daya gawai surya gratis di kantor DPD & komunitas perempuan.
UPA (Desa/RT)	Kampanye gerakan menanam mandiri & implementasi "One UPA One Product".	Kampanye penggunaan peralatan hemat energi & sosialisasi pemanfaatan biogas skala rumah tangga.

para bupati, wali kota, dan legislator PKS di tingkat daerah berkomitmen menjadi pelopor transisi energi bersih skala mikro berbasis komunitas melalui Gerakan Teknologi Surya Tepat Guna:

1. **Pembangunan Rumah Cahaya:** Mengalokasikan dana CSR perusahaan dan dana desa untuk menginstalasi jaringan listrik surya mandiri (PLTS) di kawasan-kawasan terisolir yang belum terjangkau grid listrik PLN, menjadikannya pusat aktivitas literasi digital dan ekonomi kreatif desa.
2. **Penyediaan Gerai Charger Surya Gratis:** Memanfaatkan halaman kantor DPD PKS di seluruh Indonesia untuk membangun fasilitas pengisian daya gawai bertenaga surya berkapasitas $\sim 100\ \text{Wp}$ yang dapat diakses oleh masyarakat umum secara cuma-cuma (Riyono, 2026).
3. **Penerapan Teknologi Surya Sektoral:** Mendorong pemasangan panel surya taktis pada perahu nelayan tradisional (solar boat) guna menekan biaya solar, pengoperasian pompa air surya (solar pump) untuk irigasi sawah di musim kemarau, serta pemanfaatan pagar listrik pertanian yang aman untuk menepis

Sarasehan Nasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PKS Tahun 2026 menjadi momentum krusial untuk melokalisasi visi besar kedaulatan bangsa. Dipandu oleh arahan strategis dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Pejabat Publik (BP3U) dan Komisi IV DPR RI, para pemimpin daerah dari PKS menyepakati sebuah draf pakta integritas dan komitmen aksi nyata

hama perusak tanaman petani.

3. Matriks Sinergi Kebijakan dan Pembagian Peran Eksekusi

Agar komitmen strategis ini tidak menguap sebagai janji politik semata, sarasehan merancang pembagian peran eksekusi yang taktis dan terukur sesuai garis komando partai (Riyono, 2026):

4. Menjamin Integritas: Pengawasan Berbasis SIM-PP dan Evaluasi 360 derajat

Membangun kedaulatan pangan dan energi di daerah menuntut sistem pengawasan internal yang sangat ketat guna mencegah terjadinya penyelewengan bantuan publik, monopoli pupuk, atau korupsi proyek EBT lokal oleh mafia pemburu rente.

Merujuk pada arahan Deputi Pembinaan Pejabat Publik, setiap kepala daerah dan Anggota Legislatif PKS dalam menjalankan komitmen strategis ini dipantau secara real-time melalui platform digital SIM-PP (Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Pejabat) (BP3U DPP PKS, 2026).

Melalui metode Monev 360°, kinerja pejabat publik PKS dievaluasi secara holistik melibatkan:

- **Penilaian Struktur:** Menilai keselaras-san kebijakan kepala daerah dengan visi ideologis perjuangan partai terkait ketahanan pangan-energi.
- **Peer Review:** Penilaian antarrekan sejawat mengenai integritas moral dan koordinasi antardinas terkait.
- **Feedback Konstituen:** Penilaian kepuasan publik langsung dari masyarakat di lapangan terkait dampak nyata kebijakan swasembada

yang dirasakan di dapur dan rumah mereka.

Evaluasi berbasis data (data-driven decision) ini menjadi tolok ukur utama partai untuk menentukan promosi, rotasi, maupun rekomendasi pencalonan kembali pejabat publik PKS dalam kontestasi politik berikutnya. Hal ini menjadi komitmen moral bahwa PKS hanya melahirkan para pemimpin yang berdedikasi penuh melayani rakyat.

Kesimpulan: Menuju Kemandirian yang Bermartabat

Catatan strategis dari Sarasehan Kepala Daerah PKS ini menegaskan satu hal penting: swasembada bukanlah sebuah mimpi utopis yang mustahil diraih. Ia adalah keniscayaan historis dan ekologis yang dapat kita wujudkan secara bertahap apabila kita memiliki keberanian politik, integritas moral, dan ketangkasan dalam menerjemahkan visi nasional menjadi aksi-aksi lokal yang berdampak nyata.

Dari lumbung pangan di kantor-kantor DPD, dari instalasi panel surya di perahu nelayan Selat Makassar, hingga penguatan basis data pertanian lewat SIM-PP, para pejabat publik PKS di daerah siap bergerak serempak di garda terdepan perjuangan ini. Dengan semangat kebersamaan bersama rakyat dan rida Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bangun kedaulatan sejati, dari desa untuk marwah dan kejayaan Republik Indonesia.

Analisis Sektoral Daerah

Membuka Gerbang Barat: Strategi Transformasi Ekonomi dan Terobosan Investasi di Tengah Keterbatasan Fiskal Sumatera Barat

Oleh: | **H. Mahyeldi Ansharullah, S.P**
Gubernur Sumatera Barat

Pendahuluan: Paradoks Geografis dan Jeratan Struktur Ekonomi Konsumsi

Provinsi Sumatera Barat secara geopolitik memegang peran sebagai salah satu jangkar utama konektivitas dan perdagangan di wilayah barat Indonesia. Menghadap langsung ke Samudra Hindia, Ranah Minang dianugerahi kekayaan alam kelautan,

Tren Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat periode 2025– 2027

Tahun Anggaran	Proporsi Belanja Modal (%)	Nilai Anggaran (Rupiah)	Implikasi Terhadap Infrastruktur
2025	11,72%	Rp 701,15 Miliar	Terbatas pada pemeliharaan jalan utama dan fasilitas publik esensial.
2026	7,35%	Rp 471,12 Miliar	Titik terendah ruang belanja modal; mendesak percepatan skema kemitraan swasta.
2027 (Proyeksi)	18,45%	Rp 1.265 Miliar	Mulai pulih; difokuskan pada konektivitas koridor pariwisata dan pertanian.

Sumber: Paparan RKPD Provinsi Sumatera Barat, 2026.

potensi pariwisata berkelas dunia, dan warisan budaya yang kuat. Namun, keunggulan komparatif ini dihadapkan pada tantangan struktural yang mendasar di tingkat makroekonomi daerah.

Sumatera Barat saat ini berada dalam kondisi eksisting yang memerlukan pembenahan mendalam. Struktur perekonomian daerah masih bertumpu dominan pada sektor konsumsi masyarakat, sementara penyerapan tenaga kerja di sektor formal serta realisasi investasi produktif masih jauh dari optimal (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2026). Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi daerah cenderung berjalan stagnan dan belum mampu mendorong lompatan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Guna memutus siklus pertumbuhan yang terbatas ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merumuskan langkah terobosan radikal. Melalui reorientasi kebijakan yang agresif, fokus pembangunan dialihkan pada penguatan iklim investasi dan transformasi ekonomi hulu-hilir. Langkah ini penting untuk menggeser ketergantungan dari ekonomi berbasis konsumsi menuju ekonomi berbasis produksi dan jasa bernilai tambah tinggi, sekaligus memosisikan Sumatera Barat sebagai gerbang investasi utama di bagian barat Indonesia.

Membedah Akar Masalah: Ruang Fiskal yang Terkunci

Salah satu kendala terbesar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Sumatera Barat adalah sempitnya ruang fiskal (fiscal space) daerah. Kapasitas

APBD yang terbatas membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk melakukan intervensi pembangunan secara mandiri tanpa dukungan investasi swasta.

Akar masalah ruang fiskal Sumatera Barat dapat diidentifikasi melalui tiga parameter utama:

1. **Pendapatan Daerah yang Stagnan:** Proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah sangat terbatas dan berjalan lambat. Pendapatan daerah diperkirakan hanya bergeser dari Rp 6,14 Triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 6,88 Triliun pada target tahun 2027 (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2026).
2. **Beban Belanja Pegawai yang Dominan:** Sebesar 43,4% anggaran belanja APBD secara otomatis terkunci untuk membayar gaji pegawai (belanja pegawai). Hal ini menyisakan porsi yang sangat minim untuk belanja program langsung yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
3. **Krisis Belanja Modal:** Akibat tekanan belanja pegawai, alokasi anggaran belanja modal tertekan drastis di bawah batas ideal 19%. Penurunan alokasi ini sangat mengkhawatirkan karena menghambat kemampuan daerah untuk mengejar ketertinggalan konektivitas infrastruktur wilayah.

Berikut adalah tren belanja modal Provinsi Sumatera Barat periode 2025–2027 yang mencerminkan ketatnya ruang anggaran pembangunan (Lihat Tabel):

Sempitnya ruang fiskal ini menegaskan satu kesimpulan mutlak: Sumatera Barat tidak bisa lagi mengandalkan APBD sebagai mesin tunggal penggerak pembangunan.

Diperlukan skema pembiayaan alternatif melalui investasi langsung (Direct Investment), kolaborasi swasta-pemerintah (KPBU), serta optimalisasi potensi ekonomi daerah untuk menciptakan pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan.

"Sumatera Barat saat ini berada dalam kondisi eksisting yang memerlukan pembenahan mendalam. Struktur perekonomian daerah masih bertumpu dominan pada sektor konsumsi masyarakat, sementara penyerapan tenaga kerja di sektor formal serta realisasi investasi produktif masih jauh dari optimal."

Strategi Terobosan Investasi: Meng-optimalkan KEK Pariwisata Dunia

Menghadapi keterbatasan fiskal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meluncurkan strategi terobosan pariwisata terpadu dengan menetapkan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) andalan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru:

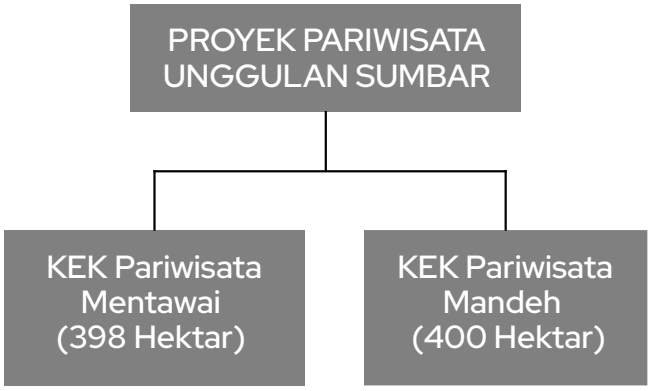

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai telah lama dikenal di komunitas internasional sebagai surga peselancar dunia (surfing paradise). Guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dari kunjungan wisatawan mancanegara, pemerintah daerah merancang KEK Pariwisata Mentawai seluas $398\ \text{Ha}$ yang berlokasi di Desa Pasakiat, Taileleu, Siberut Barat Daya (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2026).

Rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus ini diarahkan pada investasi pariwisata kelas dunia yang terintegrasi:

- **Wisata Bahari (Marine Tourism):** Pembangunan pusat olahraga air (water sport), taman air (water park), serta restoran terapung untuk memaksimalkan potensi pesisir pantai.
- **Wisata Agro (Agro Tourism):** Mengembangkan kawasan agrowisata berbasis komoditas lokal, area perkemahan (nomadic tourism), dan

"Provinsi Sumatera Barat sedang menempuh haluan baru untuk membebaskan diri dari keterbatasan ruang fiskal APBD. Melalui strategi akselerasi investasi pariwisata hijau di KEK Mentawai dan KWB Mandeh, daerah ini membuktikan bahwa keterbatasan fiskal dapat diatasi melalui keberanian melakukan inovasi kebijakan dan keterbukaan iklim investasi yang sehat."

taman bermain ramah keluarga.

- **Pusat Hiburan Terpadu:** Pembangunan pelabuhan yacht (marina), beach club, gedung pameran kesenian, lapangan golf beserta club house, serta area pacuan kuda.
- **Akomodasi Premium:** Menyediakan fasilitas penginapan berupa kondotel pantai, vila eksklusif, serta resor tematik guna memperpanjang durasi tinggal (*length of stay*) wisatawan asing.

2. Kawasan Wisata Bahari (KWB) Mandeh

Kawasan Mandeh yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan sering dijuluki sebagai "Raja Ampat-nya Sumatra". Dengan luas area pengembangan mencapai sekitar $400\ \text{Ha}$ (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2026), Mandeh diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan pariwisata bahari unggulan di pantai barat Sumatra.

Rencana investasi strategis di KWB Mandeh meliputi:

- Infrastruktur Dermaga: Pembangunan jetty yacht dengan kapasitas menampung hingga 20 kapal pesiar mini.
- Kawasan Komersial & Publik: Pengembangan wisata pantai panjang seluas $12\ \text{Ha}$ yang dilengkapi arena olahraga pantai (beach sport arena), gedung serbaguna, menara pandang, kolam renang komunal, serta deretan kafe dan restoran lokal.
- Wisata Ekologi: Memanfaatkan kawasan hutan bakau seluas $29\ \text{Ha}$ untuk ekowisata mangrove yang edukatif dan protektif terhadap abrasi pantai.
- Resor Eksklusif: Pembagian kawasan akomodasi menjadi Public Resort seluas $24\ \text{Ha}$ untuk segmen umum, serta Private Resort seluas $35\ \text{Ha}$ dengan standar pelayanan kelas eksekutif untuk menarik ceruk pasar wisatawan premium.

Sinergi dan Kedaulatan Ekonomi Berkelanjutan

Hadirnya investasi pariwisata skala besar di Mentawai dan Mandeh tidak boleh mengulangi kegagalan model pembangunan neoliberal yang memarjinalkan warga lokal. Sejalan dengan arah perjuangan Ekonomi Pancasila, masyarakat lokal tidak boleh ditempatkan sebagai penonton dari megahnya resor pariwisata swasta.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan prinsip kemitraan yang adil melalui penguatan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas:

- **Integrasi Rantai Pasok Lokal:** Mewajibkan seluruh pengelola hotel, resor, dan restoran di kawasan KEK untuk menyerap pasokan bahan pangan, sayur-mayur, buah-buahan, daging, serta hasil tangkapan nelayan lokal dari koperasi pertanian dan nelayan sekitar.
- **Pemberdayaan UMKM Kreatif:** Menyediakan pusat-pusat komersial khusus di dalam kawasan pariwisata yang dikelola oleh pelaku UMKM lokal guna mempromosikan kerajinan tangan, tenun songket, serta kuliner khas Minangkabau.
- **Pelatihan Tenaga Kerja Lokal:** Mengembangkan pusat pelatihan vokasi pariwisata bagi anak-anak muda lokal Mentawai dan Pesisir Selatan agar dapat diserap sebagai tenaga kerja profesional di dalam ekosistem KEK.

Kesimpulan: Haluan Baru Kemandirian dari Gerbang Barat

Provinsi Sumatera Barat sedang menempuh haluan baru untuk membebaskan diri dari keterbatasan ruang fiskal APBD. Melalui strategi akselerasi investasi pariwisata hijau di KEK Mentawai dan KWB Mandeh, daerah ini membuktikan bahwa keterbatasan fiskal dapat diatasi melalui keberanian melakukan inovasi kebijakan dan keterbukaan iklim investasi yang sehat.

Transformasi ekonomi ini dijalankan dengan komitmen moral untuk menjaga kelestarian ekologis pantai barat Sumatra, menegakkan marwah para pelaku usaha mikro lokal, serta mendistribusikan kemakmuran pariwisata secara adil hingga ke pedesaan pesisir. Di bawah komitmen kepemimpinan daerah yang bersih, peduli, dan profesional, Sumatera Barat siap melangkah mantap mewujudkan kedaulatan ekonomi sejati di barat Indonesia.

Analisis Sektoral Daerah

Melampaui Kejayaan Batubara: Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Sinergi Maritim di Kabupaten Kutai Timur

Oleh: | **H. Ardiansyah Sulaiman**
Bupati Kabupaten Kutai Timur

Pendahuluan: Geopolitik Strategis dan Tantangan Monokultur Komoditas

Kabupaten Kutai Timur berdiri di atas wilayah daratan yang sangat luas mencapai $31.777,03\ \text{km}^2$ dengan bentang garis pantai sepanjang $587,62\ \text{km}$ menghadap ke timur Pulau Kalimantan (Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, 2026). Secara

geopolitik dan geoekonomi, daerah yang berjuluk Bumi Untung Benua ini memegang posisi yang luar biasa strategis dalam peta konektivitas maritim nasional maupun global.

Kutai Timur terletak langsung pada koridor Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) di Selat Makassar. Alur ini merupakan salah satu jalur pelayaran internasional paling padat di dunia yang menghubungkan langsung arus logistik internasional dari Australia dan Nusantara menuju Asia Timur (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan), Timur Tengah, Asia Selatan, hingga ke kawasan Samudra Pasifik. Posisi strategis regional ini kian krusial dan memiliki nilai tawar tinggi seiring dengan letak geografis Kutai Timur yang bertetangga dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan utama di Kalimantan Timur, seperti Samarinda, Bontang, hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, di balik melimpahnya anugerah kekayaan alam dan keunggulan geografis tersebut, Kutai Timur menghadapi tantangan struktural yang klasik: ketergantungan yang teramat tinggi pada sektor ekstraktif pertambangan batubara. Sebagai salah satu lumbung energi fosil terbesar di Indonesia, struktur PDRB Kutai Timur selama berdekade-dekade didominasi oleh komoditas tambang. Dominasi satu sektor tunggal (monokultur ekonomi) ini menyimpan kerentanan besar.

Dinamika fluktuasi harga batubara global, komitmen dekarbonisasi dunia, serta regulasi transisi energi bersih nasional seketika dapat memicu guncangan fiskal (fiscal shock) yang merongrong stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketika pendapatan daerah dari bagi hasil minerba merosot, program-program pembangunan fisik dan sosial di tingkat akar rumput pun ikut terancam terhenti.

Menyadari risiko sistemik dari perangkap komoditas ekstraktif tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di bawah kepemimpinan H.

"Melalui program percepatan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan, Kutai Timur mulai menggeser haluan pembangunannya dari ketergantungan sektor ekstraktif tambang menuju penguatan sektor-sektor produktif yang dapat diperbarui (renewable resources)."

Matriks Potensi Strategis Dan Arah Kebijakan Diversifikasi Kabupaten Kutai Timur:

Dimensi Strategis	Potensi Riil / Karakteristik	Arah Kebijakan & Sinergi
Konektivitas ALKI II	Selat Makassar sepanjang 587,62 km; gerbang logistik global.	Pengembangan pelabuhan laut terpadu, pusat logistik, dan industri maritim daerah untuk memotong biaya ekspor.
Penyangga IKN	Kedekatan koridor ekonomi regional; penyedia rantai pasok vital.	Akselerasi produksi pangan, peternakan, dan komoditas perkebunan hortikultura untuk menyuplai kebutuhan harian IKN.
Hilirisasi Pertanian	Luas wilayah daratan subur mencapai 31.777,03 km².	Pembangunan pabrik pengolah-an kelapa sawit rakyat, industri turunan CPO skala kecil, dan hili-risasi produk pertanian unggulan.
Kedaulatan Maritim	Perairan kaya yang dilintasi arus ALKI II Selat Makassar.	Modernisasi armada nelayan tradisional, penguatan koperasi nelayan, dan pembangunan fasilitas pendingin (cold storage) komunal.

Ardiansyah Sulaiman melakukan reorientasi arah kebijakan strategis secara radikal. Melalui program percepatan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan, Kutai Timur mulai menggeser haluan pembangu-nannya dari ketergantungan sektor ekstraktif tambang menuju penguatan sektor-sektor produktif yang dapat diperbarui (renewable resources), seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat, kelautan dan perikanan, serta optimalisasi sektor industri hilir dan logistik maritim.

Sinergi Nasional-Daerah: Menghu-bungkan Kutai Timur dengan IKN dan Pasar Global

Sebagai bagian integral dari koridor ekonomi Kalimantan Timur, akselerasi pembangunan Kutai Timur dirancang untuk tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terintegrasi penuh dengan visi prioritas pembangunan nasional. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur diposisikan sebagai katalisator utama bagi Kutai Timur untuk mengambil peran aktif sebagai mitra penyangga utama (supporting partner). Peran strategis ini diwujudkan

melalui kesiapan menyuplai rantai pasok kebutuhan logistik pangan, bahan baku hortikultura, material konstruksi ramah lingkungan, hingga kolaborasi pengembangan industri manufaktur hijau.

Optimalisasi poros ALKI II menjadi pilar utama dalam strategi diversifikasi ini. Garis pantai sepanjang 587,62 km bukan lagi sekadar batas geografis dingin, melainkan wilayah ekonomi aktif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi infrastruktur pelabuhan laut internasional terpadu, kawasan industri maritim, serta pusat logistik ekspor-impor yang menghubungkan hasil bumi pedalaman Kalimantan langsung ke pasar global. Hilirisasi di sektor maritim ini bertujuan menarik investasi non-tambang yang berfokus pada pengolahan produk mentah hasil bumi setempat, sehingga nilai tambah ekonomi terbesar (added value) tetap berputar di dalam daerah untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Kutai Timur.

Berikut adalah matriks potensi strategis dan arah kebijakan diversifikasi Kabupaten Kutai Timur:

Mengatasi Kendala Struktural: Tata Kelola Kebijakan dan Politik Anggaran

Upaya menata kembali struktur ekonomi Kutai Timur agar mandiri dan berdaulat tidak terlepas dari berbagai kendala tata kelola pemerintahan

"Petani rakyat didorong dan difasilitasi untuk mengelola unit-unit pengolahan minyak sawit skala mikro secara gotong royong guna memproduksi produk turunan bernilai tambah tinggi. sehingga keuntungan ekonomi tidak lagi tersedot keluar daerah."

(governance) yang harus diselesaikan secara berani dan taktis. Berdasarkan evaluasi kinerja pemerintah daerah (2026), terdapat empat tantangan utama dalam penyusunan kebijakan publik dan politik anggaran pembangunan di Kutai Timur yang membutuhkan perhatian mendalam:

1. **Paradoks Kebutuhan vs Fiskal:** Sebagai daerah dengan wilayah daratan yang sangat luas, usulan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, listrik, air bersih) dari tingkat desa melalui mekanisme Musrenbang jumlahnya selalu melimpah ruah. Hal ini sering kali menciptakan kesenjangan lebar dengan kemampuan fiskal riil daerah, terutama ketika pendapatan daerah berfluktuasi tajam mengikuti naik-turunnya royalti pertambangan batubara di pasar internasional.
2. **Sinkronisasi Perencanaan dan Politik Anggaran:** Menyelaraskan

program-program prioritas teknokratis yang tertuang dalam Rencana Pemba-ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan aspirasi politik legislatif (DPRD) melalui pokok-pokok pikiran (pokir) sering kali memicu benturan skala prioritas di ruang penganggaran. Diperlukan komunikasi politik yang bijak dan berorientasi kenegarawanan agar anggaran daerah tetap fokus pada program perlindungan rakyat terkecil, bukan kepentingan kelompok tertentu.

3. **Kualitas Data Dasar (Basic Data):** Pengambilan kebijakan publik yang presisi dan tepat sasaran membutuhkan ketersediaan basis data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi hingga ke tingkat RT dan kampung. Keterbatasan data sektoral mengenai jumlah petani miskin, produktivitas lahan rill, dan peta sebaran nelayan tradisional sering kali menghambat efektivitas penyaluran bantuan modal usaha, bibit, maupun pupuk subsidi dari pemerintah.
4. **Regulasi Pusat yang Dinamis:** Dinamika perubahan regulasi dan kebijakan di tingkat nasional—baik terkait pengelolaan pertambangan, perimbangan keuangan pusat-daerah, hingga aturan tata ruang nasional—menuntut birokrasi daerah untuk senantiasa adaptif dan tangkas. Penyesuaian program pembangunan harus dilakukan secara cepat guna menghindari tumpang tindih anggaran (overlapping) serta potensi kendala hukum di kemudian hari.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan sistemik tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen menerapkan reformasi

"Kabupaten Kutai Timur kini sedang mengukir sejarah baru dalam perjalanan pembangunannya. Kejayaan batubara yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi kini mulai didekonstruksi secara perlahan, terencana, dan berkeadilan demi menyambut masa depan daerah yang lebih hijau, adil, mandiri, dan berkelanjutan."

birokrasi secara menyeluruh. Langkah konkret dilakukan melalui penerapan digitalisasi tata kelola keuangan daerah, penyederhanaan sistem birokrasi perizinan investasi hijau, serta penguatan akurasi database tunggal desa. Kebijakan ini krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, bebas korupsi, serta berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan.

Membangun Kemandirian Sektor Berkelanjutan: Pertanian dan Kelautan

Sektor pertanian dalam arti luas—termasuk di dalamnya perkebunan rakyat serta sektor kelautan dan perikanan—merupakan fondasi sejati bagi tegaknya kedaulatan ekonomi kerakyatan di Kutai Timur. Sejalan dengan falsafah Ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Prof. Mubyarto (1981), arah pembangunan daerah tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan materiil dingin yang digerakkan oleh korporasi-korporasi tambang skala besar, melainkan harus diletakkan pada penguatan ekonomi subsisten pertanian berbasis keluarga tani dan nelayan mandiri di pedesaan.

- Revolusi Hilirisasi Perkebunan Sawit Rakyat: Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan di Kutai Timur, namun selama ini sebagian besar hasilnya masih dijual dalam bentuk tandan buah segar (TBS) mentah atau minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) melalui korporasi besar. Pemerintah Kutai Timur mendorong transformasi perkebunan sawit rakyat melalui penguatan kelembagaan koperasi tani. Petani rakyat didorong dan difasilitasi untuk mengelola unit-unit pengolahan minyak sawit skala mikro secara gotong royong guna memproduksi produk turunan bernilai tambah tinggi—seperti minyak goreng curah lokal, pupuk organik dari limbah sawit, hingga pakan ternak terintegrasi—sehingga keuntungan ekonomi tidak lagi tersedot keluar daerah.
- Kedaulatan Nelayan Pesisir ALKI II: Selat Makassar menyimpan kekayaan

laut yang sangat luar biasa melimpah. Namun, nelayan tradisional Kutai Timur sering kali tidak berdaya menghadapi fluktuasi harga akibat permainan para tengkulak yang menguasai rantai distribusi dingin (cold chain). Pemerintah daerah menjawab tantangan ini dengan menyalurkan bantuan armada kapal nelayan modern ramah lingkungan, alat navigasi digital tepat guna, serta membangun fasilitas penyimpanan dingin bertenaga surya (solar-powered cold storage) komunal di kampung-kampung pesisir. Kehadiran teknologi EBT surya lokal ini memungkinkan nelayan menyimpan hasil tangkapannya agar tetap segar dalam jangka waktu lama, sehingga mereka memiliki posisi tawar tinggi dalam menentukan harga jual di pasar dan terbebas dari jerat utang lintah darat.

Kesimpulan: Menuju Model Pembangunan Hijau yang Mandiri

Kabupaten Kutai Timur kini sedang mengukir sejarah baru dalam perjalanan pembangunannya. Kejayaan batubara yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi kini mulai didekonstruksi secara perlahan, terencana, dan berkeadilan demi menyambut masa depan daerah yang lebih hijau, adil, mandiri, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi nasional-daerah yang kokoh, pemanfaatan posisi geopolitik ALKI II yang luar biasa strategis, reformasi tata kelola birokrasi anggaran yang transparan, serta komitmen politik tanpa kompromi untuk memprioritaskan kedaulatan pangan dan maritim lokal, Kutai Timur siap membuktikan diri sebagai model sukses transisi ekonomi hijau bagi daerah-daerah ekstraktif lainnya di seluruh Indonesia. Langkah-langkah strategis ini merupakan manifestasi nyata dari upaya menegakkan kembali marwah bangsa dan mewujudkan kesejahteraan sejati yang berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Kutai Timur, dari desa hingga ke tingkat nasional.

Analisis Sektoral Daerah

Membangun Potensi Wilayah untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Rakyat: Studi Kasus Transformasi Ekonomi Berkelanjutan di Kabupaten Berau

Oleh: | **Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd.**
Bupati Kabupaten Berau

Pendahuluan: Paradoks Komoditas dan Tantangan Dekarbonisasi Daerah

Kabupaten Berau, yang terletak di ujung utara Provinsi Kalimantan Timur, merupakan daerah dengan karakteristik geografis dan ekologis yang unik. Dengan luas wilayah daratan mencapai 22.030,81 km² dan wilayah perairan sebesar 12.299,88 km² (Pemerintah

Kabupaten Berau, 2026), Bumi Batiwakkal memiliki modal alam yang luar biasa masif. Namun, seperti kebanyakan daerah kaya sumber daya alam di Indonesia, Berau selama bertahun-tahun terjebak dalam ketergantungan ekonomi ekstraktif pada sektor pertambangan batu bara.

Ketika ketidakpastian ekonomi global dan transisi energi bersih mulai mengetuk pintu pembangunan nasional, kerentanan struktur ekonomi Berau langsung terpapar. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Berau tercatat mengalami perlambatan drastis dari 7,28% pada tahun 2024 menjadi 2,48% pada tahun 2025 (Kabupaten Berau Dalam Angka, 2026). Perlambatan ini dipicu langsung oleh kontraksi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar -0,45% yang selama ini mendominasi produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.

Kondisi transisi ini melahirkan kesadaran kolektif: kemandirian ekonomi daerah tidak bisa digantungkan pada komoditas fosil yang fluktuatif dan merusak ekosistem jangka panjang. Di bawah kepemimpinan Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd., Pemerintah Kabupaten Berau merumuskan arah kebijakan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 untuk memicu transformasi struktural menuju ekonomi hijau berkelanjutan, dengan mengoptimalkan sektor pertanian, perkebunan non-kelapa sawit, usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta kepariwisataan berbasis kelestarian lingkungan.

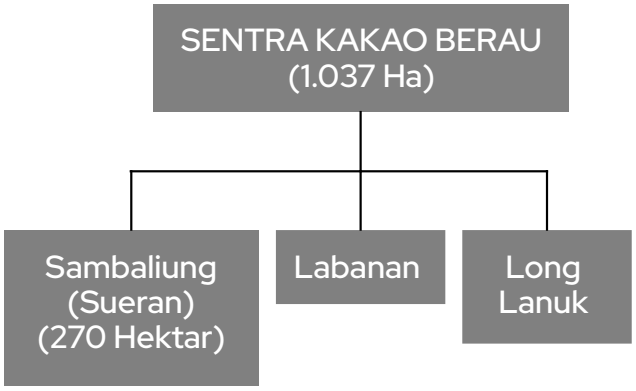

"Kunci kemandirian pangan dan kedaulatan ekonomi daerah Berau diletakkan pada revitalisasi sektor perkebunan rakyat yang berkelanjutan, khususnya komoditas kakao."

Makroekonomi Berau: Menilai Kinerja Transisi dan Pemerataan

Meskipun dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat penurunan produksi sektor tambang, kebijakan afirmatif pembangunan daerah yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Berau justru menunjukkan pencapaian yang sangat positif.

Berikut adalah indikator makroekonomi Kabupaten Berau yang menunjukkan keberhasilan penekanan

indikator makroekonomi Kabupaten Berau

Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Implikasi Kebijakan
Laju Pertum-buhan Ekono-mi (LPE)	%	7,28	2,48	Perlambatan akibat kontraksi tambang; mendesak hilirisasi sektor hijau.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,17	77,72	Meningkat 0,71%; menunjuk-kan perbaikan akses kesehatan & pendidikan.
Tingkat Kemiskinan	%	5,08	4,44	Turun 0,64 poin; di bawah tingkat kemiskinan provinsi (5,17%) & nasional (8,47%).
Rasio Gini (Inequality)	Indeks	0,317	0,294	Penurunan ketimpangan yang signifikan (Δ G = -0,023) menuju kategori pemerataan baik.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,15	4,40	Turun 0,75 poin; keberhasil--an program padat karya dan BLK mandiri.
PDRB Per Kapita	Juta Rp	194,08	193,39	Stabil di tingkat tinggi, men-cerminkan produktivitas ekonomi warga yang tangguh

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Berau & BPS Kabupaten Berau Dalam Angka, 2026..

angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (lihat tabel)

Keberhasilan menekan Rasio Gini hingga mencapai $0,294$ pada tahun 2025 adalah bukti otentik dari pelembagaan nilai-nilai Ekonomi Pancasila di tingkat daerah. Ketika kemakmuran tidak lagi terpusat pada korporasi tambang besar melainkan mengalir ke kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui program perlindungan sosial terpadu, di situlah keadilan distributif yang dicita-citakan oleh Prof. Mubyarto berhasil diwujudkan.

Kedaulatan Pangan dari Hulu ke Hilir: Kisah Sukses "Kakao Merasa"

Kunci kemandirian pangan dan kedaulatan ekonomi daerah Berau diletakkan pada revitalisasi sektor perkebunan rakyat yang berkelanjutan,

khususnya komoditas kakao. Kabupaten Berau memiliki lahan potensial kakao seluas 1.037 hektar dengan total produksi mencapai lebih dari 800 ton biji kakao kering per tahun (Pemerintah Kabupaten Berau, 2026). Sentra produksi utama komoditas ini terkonsentrasi di kawasan Sambaliung—khususnya Kampung Sueran seluas 270 hektar—serta Kampung Labanan dan Kampung Long Lanuk.

Salah satu inovasi terbesar yang diakui secara nasional dan internasional adalah pengembangan Kakao Merasa. Biji kakao asal Berau ini dinobatkan sebagai salah satu biji kakao terbaik di tingkat nasional dalam ajang SIAL Interfood dan Lomba Biji Kakao Nasional karena profil rasanya (flavor profile) yang sangat unik dan kaya. Cita rasa khas ini menarik minat pasar premium global, mulai dari pasar domestik di Bali hingga korporasi cokelat premium terkenal asal Prancis, Valrhona.

Melalui program pemberdayaan terintegrasi, petani kakao Berau tidak lagi menjual produk mereka dalam bentuk biji mentah murah. Pemerintah daerah mendorong:

1. **Peningkatan Kapasitas Pascaproduksi:** Pelatihan teknik fermentasi mandiri di tingkat petani guna menaikkan harga jual biji kakao secara eksponensial.
2. **Kemitraan Berbasis Syirkah:** Mendorong petani bergabung dalam koperasi pertanian terpadu sebagai wadah pelindung dari fluktuasi harga pasar yang dikendalikan para tengkulak perantara.
3. **Pemberian Stimulan Teknologi Bersih:** Penyaluran bantuan sarana

produksi pertanian (saprodi) berbasis teknologi organik tepat guna demi menjaga kelestarian hulu tanah hutan Berau yang melingkupi 75% wilayah daerah (Bapelitbang Kabupaten Berau, 2026).

Pariwisata Bahari dan EBT Lokal: Kedaulatan Energi Berbasis Komunitas

Selain kedaulatan pangan berbasis kakao, arah transformasi ekonomi baru Berau bertumpu pada pengembangan ekowisata bahari kelas dunia di Kepulauan Derawan, Pulau Maratua, dan pesisir pantai Biduk-Biduk. Untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi laut ini dari kerusakan ekologis, Pemerintah Kabupaten Berau menerapkan model pembangunan hijau (green developmentalism) melalui integrasi energi baru terbarukan (EBT) lokal.

Pulau Maratua dan Derawan yang terisolasi dari grid listrik PLN daratan kini didorong untuk mengadopsi sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mandiri guna menggantikan penggunaan genset diesel fosil yang berbiaya operasional tinggi dan menghasilkan polusi udara kotor. Langkah ini selaras dengan konsep dekarbonisasi komunitas yang diusung dalam gagasan transisi energi berkeadilan.

Sektor pariwisata bahari Berau juga dipadukan dengan kedaulatan ekonomi masyarakat pesisir melalui penyediaan armada kapal nelayan bertenaga surya (solar boat) sederhana, pengadaan pompa air bertenaga surya (solar pump) untuk pemenuhan kebutuhan air tawar bersih warga pulau terpencil, serta pemasangan alat pendingin bertenaga surya untuk mengawetkan hasil tangkapan nelayan tradisional secara mandiri tanpa terikat oleh ketersediaan BBM solar subsidi yang langka.

Kepemimpinan dari Rumah: Sinergi Peran Domestik dan Eksternal

Keberhasilan program pembangunan makro dan sektoral di Kabupaten Berau tidak dapat dipisahkan dari filosofi kepemimpinan spiritual yang dianut oleh Bupati Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd. Sebagai seorang ibu pemimpin daerah, beliau meyakini prinsip kepemimpinan yang berimbang dan terintegrasi:

Fokus Kontribusi Pimpinan = 60% Domestik (Fondasi) + 40% Eksternal (Pengaruh)

Filosofi ini berlandaskan pada keyakinan spiritual bahwa ketahanan sebuah daerah bermula dari ketahanan unit sosial terkecil, yaitu keluarga (sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an QS. At-Tahrim: 6 dan Hadits HR. Tirmidzi). Seorang pemimpin yang mampu menjaga, mendidik, dan mengokohkan moralitas keluarganya sendiri akan memancarkan keteladanan yang kuat (leadership by example) di ruang publik.

Keteladanan dari rumah ini kemudian ditranslasikan ke dalam arah kebijakan daerah yang berfokus pada empat

gerakan utama:

1. **Ketahanan Keluarga:** Menginteg-rasikan program pengentasan kemiskinan dengan pembinaan karakter dan moral keluarga sakinah.
2. **Pendidikan Cerdas**: Menerapkan program "Berau Cerdas" melalui penyediaan 1.000 laptop untuk guru, pemberian beasiswa prestasi, serta bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu.
3. **Kesehatan Berkualitas:** Penguatan program posyandu, peningkatan insentif kader kesehatan, penyedia-an BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, serta penyediaan fasilitas air bersih terpadu melalui target 25.000 sambungan rumah baru.
4. **Pemberdayaan Perempuan:** Meningkatkan keterlibatan aktif kelompok perempuan di tingkat kampung dalam mengelola usaha mikro-kreatif berbasis pangan dan kerajinan lokal melalui penyediaan kredit lunak bebas riba.

Kesimpulan: Haluan Baru Kemandirian Daerah dari Berau

Kabupaten Berau di bawah kepemimpinan Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd. telah membuktikan bahwa ketergantungan kronis terhadap komoditas tambang ekstraktif batubara dapat diputus secara bertahap melalui komitmen politik yang berpihak pada keadilan sosial dan kelestarian ekologis.

Melalui dekonstruksi atas paradigma lama yang hanya mengejar pertumbuhan PDB semata, Berau meletakkan fondasi baru kemandirian ekonominya pada tiga pilar utama: kedaulatan pangan berbasis kakao premium yang mendunia, pariwisata bahari berkelanjutan yang ditopang oleh teknologi EBT surya lokal, serta ketahanan sosial-kemasyarakatan yang kokoh berbasis kekuatan moral keluarga dari rumah.

"Berau meletakkan fondasi baru kemandirian ekonomi-nya pada tiga pilar utama: kedaulatan pangan berbasis kakao premium yang mendunia, pariwisata bahari berkelanjutan yang ditopang oleh teknologi EBT surya lokal, serta ketahanan sosial-kemasyarakatan yang kokoh berbasis kekuatan moral keluarga dari rumah."

Langkah-langkah strategis ini merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai luhur Ekonomi Pancasila dan khidmat sejati para pejabat publik untuk mengembalikan marwah serta kesejahteraan sejati ke tangan rakyat banyak. Dari Berau, kita melihat fajar baru kemandirian Indonesia sedang terbit dengan sangat indahnya.

Analisis Sektoral Daerah

Pilar Agromaritim di Gerbang Timur: Kemandirian Pangan dan Kelautan Berbasis Bingkai Saruma di Kabupaten Halmahera Selatan

Oleh: | **Hasan Ali Bassam Kasuba**
Bupati Kabupaten Halmahera Selatan

Pendahuluan: Paradoks Wilayah Kepulauan dan Visi Strategis Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 (Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, 2026), merupakan salah satu daerah kepulauan terluas dan paling strategis di Provinsi Maluku Utara. Dengan bentang daratan seluas $8.148,89\ \text{km}^2$ yang

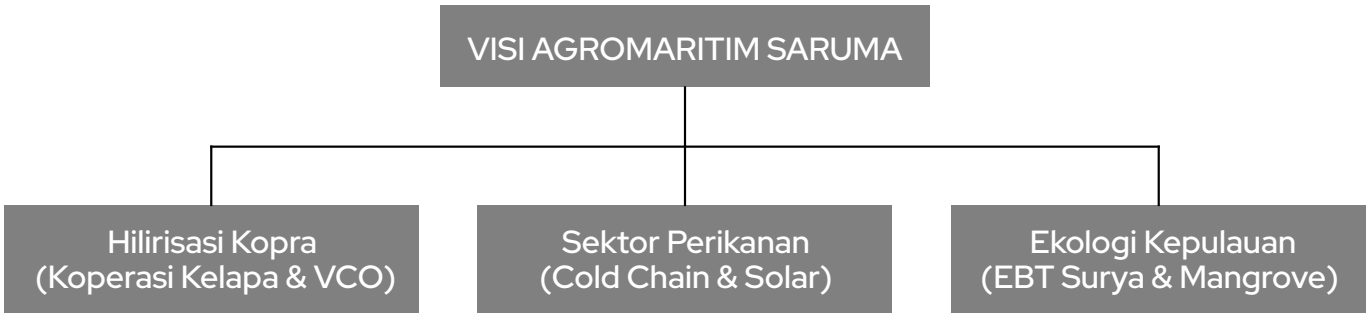

tersebar di ratusan pulau kecil serta dikelilingi oleh lautan luas mencapai $31.428,78\ \text{km}^2$, wilayah ini dikaruniai potensi kekayaan agromaritim yang luar biasa melimpah.

Namun, sebagai daerah kepulauan, Halmahera Selatan menghadapi tantangan geografis yang kompleks berupa konektivitas antar-pulau (inter-island connectivity), kerentanan rantai pasok pangan dari luar daerah, serta ancaman eksploitasi mineral tambang nikel skala besar yang berisiko merusak ekosistem darat dan pesisir (Ember, 2025).

Menjawab tantangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 menetapkan visi perubahan yang fundamental: "Mewujudkan Senyum Halmahera Selatan yang Adil, Maju, dan Berkelanjutan Berbasis Agromaritim dalam Bingkai Saruma Penuh Berkah" (Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, 2026).

Falsafah Saruma (Satu Rumah) direkonstruksi bukan sekadar sebagai jargon sosial-kultural, melainkan sebagai fondasi persatuan, gotong royong, dan stabilitas keamanan daerah yang menaungi seluruh keragaman masyarakat. Di atas fondasi harmoni sosial inilah, kedaulatan pangan, kemandirian perikanan, serta pembangunan ekonomi yang adil dan merata ditegakkan.

"Sebagai daerah kepulauan, Halmahera Selatan menghadapi tantangan geografis yang kompleks berupa konektivitas antar-pulau (inter-island connectivity), kerentanan rantai pasok pangan dari luar daerah, serta ancaman eksploitasi mineral tambang nikel skala besar yang berisiko merusak ekosistem darat dan pesisir."

Makro Ekonomi dan Kinerja Tata Kelola: Konsolidasi Menuju Pelayanan Prima

Keberhasilan implementasi visi agromaritim di Halmahera Selatan ditopang oleh penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini tecermin dari pencapaian kinerja makro dan penghargaan nasional yang berhasil diraih sepanjang periode 2025-2026:

- **Sektor BUMD Profesional:** Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sukses meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 di Jakarta (Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, 2026), termasuk penghargaan untuk BUMD PT SPR Byajean Halmahera atas tata kelola bisnis yang sehat dan kontribusinya pada PAD.
- **Akselerasi Transaksi Keuangan Digital:** Meraih penghargaan sebagai Rookie TP2DD Terbaik II tingkat nasional dari Kemenko Perekonomian (2026), menunjukkan keberhasilan digitalisasi pajak dan retribusi daerah yang meminimalkan kebocoran anggaran.
- **Pelayanan Publik & Kesehatan Semesta:** Indeks Pelayanan Publik meraih skor $3,55$ (Kategori Prima) dari KemenPAN-RB, serta pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98% dari Kemenkes/BPJS (Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, 2026), menjamin akses kesehatan gratis bagi hampir seluruh warga kepulauan.

Pencapaian tata kelola digital dan pelayanan publik ini menjadi modal penting untuk mengarahkan alokasi fiskal

daerah secara efisien langsung ke sektor produktif pertanian dan perikanan rakyat.

Transformasi Sektor Agromaritim: Kedaulatan Pangan di Tanah Kepulauan

Pilar agromaritim diletakkan pada optimalisasi komoditas perkebunan rakyat tradisional (seperti kopra/kelapa, cengkeh, pala, dan kakao) serta potensi perikanan tangkap Selat Capalulu dan Laut Halmahera.

1. Hilirisasi Perkebunan Rakyat (Kopra & Kelapa)

Selama puluhan tahun, petani kelapa Halmahera Selatan menjual hasil buminya dalam bentuk kopra mentah berharga murah ke luar daerah. Pemerintah daerah mendorong transformasi perkebunan rakyat melalui:

- Pengolahan Minyak Kelapa Murni (VCO): Memfasilitasi kelompok tani pedesaan dengan teknologi pengolahan kelapa terpadu untuk memproduksi minyak kelapa berkualitas tinggi (Virgin Coconut Oil/VCO) dan turunan kosmetik organik.
- **Model Kemitraan Syirkah:** Mendorong penguatan kelembagaan koperasi desa sebagai penjamin harga beli kelapa rakyat agar petani terbebas dari jerat utang tengkulak perantara.

2. Kedaulatan Sektor Perikanan Tangkap

Laut Halmahera Selatan yang kaya merupakan habitat utama komoditas bernilai ekonomi ekspor seperti ikan tuna sirip kuning (yellowfin tuna), cakalang, dan kerapu. Guna memaksimalkan kesejahteraan nelayan tradisional, kebijakan daerah difokuskan pada:

- **Pembangunan Rantai Dingin (Cold Chain) Terintegrasi:** Membangun fasilitas penyimpanan dingin bertenaga surya (solar-powered cold storage) komunal di pulau-pulau nelayan guna menjaga kesegaran ikan pascapanen tanpa bergantung pada pasokan listrik fosil daratan yang tidak stabil.
- Modernisasi Armada Nelayan: Membagikan paket bantuan mesin motor perahu nelayan, alat tangkap ramah lingkungan, serta teknologi pencari ikan (fish finder) berbasis GPS secara berkala.

Konsolidasi Kinerja Pembangunan Sektoral

Sinergi pembangunan agromaritim dijalankan secara terstruktur melalui pembagian sektor prioritas guna menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologis daerah:

1. **Sektor Ekonomi & Ketahanan Pangan:** Mendorong gerakan menanam mandiri di pekarangan rumah melalui program "One UPA

"Dengan menolak eksploitasi ekstraktif tambang mineral yang merusak ruang hidup nelayan dan petani, Halmahera Selatan memilih jalan kemandirian sejati yang bertumpu pada kedaulatan hasil laut, hilirisasi perkebunan kelapa mandiri, pemerataan layanan kesehatan semesta (98% UHC), serta digitalisasi tata kelola daerah yang berkinerja prima."

One Product" untuk komoditas hortikultura guna menekan inflasi pangan impor, serta menyelenggarakan program Pasar Kita Semua (PAKIS) untuk memfasilitasi transaksi hasil tani langsung ke konsumen perkotaan.

2. **Sektor Transisi Energi Bersih:** Menyadari keterisolasian energi wilayah pulau kecil, daerah memicu pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mandiri skala komunitas untuk menerangi fasilitas publik, pengisian daya gawai gratis di kantor-kantor partai dan kantor desa, serta pemanfaatan pompa air bertenaga surya untuk pertanian hortikultura pulau kecil.
3. **Sektor Sosial Kemasyarakatan (Saruma):** Mengintegrasikan program pembangunan infrastruktur dasar (jalan lingkar pulau, jembatan, air bersih) dengan pembinaan kerukunan antar-suku dan agama guna menjaga persatuan warga di bawah naungan "Satu Rumah" Halmahera Selatan yang penuh berkah.

Kesimpulan: Menggenggam Daulat dari Timur Halmahera

Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Hasan Ali Bassam Kasuba membuktikan bahwa kendala geografis sebagai daerah kepulauan dapat ditaklukkan melalui kejelasan visi pembangunan agromaritim yang terpadu dan kehangatan falsafah Saruma.

Dengan menolak eksploitasi ekstraktif tambang mineral yang merusak ruang hidup nelayan dan petani, Halmahera Selatan memilih jalan kemandirian sejati yang bertumpu pada kedaulatan hasil laut, hilirisasi perkebunan kelapa mandiri, pemerataan layanan kesehatan semesta (98% UHC), serta digitalisasi tata kelola daerah yang berkinerja prima. Melalui ikhtiar pembangunan hijau yang berkeadilan sosial ini, fajar kemandirian dan marwah bangsa dari gerbang timur Indonesia siap ditegakkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat banyak.

Analisis Sektoral Multi-wilayah

Sinergi Kepemimpinan Daerah: Akselerasi Pembangunan Terpadu di Enam Wilayah Strategis

Oleh: Tim Redaksi Sinergi
Berdasarkan Dokumen Paparan Resmi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PKS (Subang, Pekanbaru, Solok, Lima Puluh Kota, Bukittinggi, dan Serang)

Pendahuluan: Merajut Desentralisasi Kesejahteraan

Pembangunan nasional yang inklusif tidak akan pernah terwujud melalui satu resep tunggal yang dipaksakan dari pusat. Kebinekaan geografis, sosial, dan potensi alam Indonesia menuntut ketangkasan para pemimpin daerah untuk menerjemahkan visi kemandirian menjadi program aksi lokal yang taktis.

Melalui Sarasehan Nasional Pejabat Publik PKS, enam wilayah strategis—mulai dari gerbang transit Jawa-Sumatra, kawasan metropolitan industri baru, pusat pariwisata warisan budaya, hingga lumbung energi panas bumi—menyajikan draf komitmen pembangunan terpadu.

Enam wilayah ini meliputi Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Subang (Jawa Barat), Kota Pekanbaru (Riau), Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatera Barat), Kota Bukittinggi (Sumatera Barat), dan Kabupaten Solok (Sumatera Barat).

Dengan menyatukan keunggulan komparatif masing-masing, para kepala daerah PKS berkomitmen membentengi ekonomi rakyat dari gejolak krisis global melalui implementasi nyata Ekonomi Pancasila yang bersih, peduli, dan profesional-negarawan.

1. Koridor Industri, Logistik, dan Infrastruktur Modern: Subang dan Pekanbaru

Akselerasi pertumbuhan ekonomi hulu-hilir membutuhkan integrasi yang kuat antara kawasan industri dengan konektivitas logistik global. Kabupaten Subang dan Kota Pekanbaru merupakan dua motor utama dalam klaster ini.

Kabupaten Subang: Episentrum Rebana Metropolitan dan Gerbang Patimban

Di bawah kepemimpinan Bupati Reynaldy Putra Andita dan Wakil Bupati Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M., Kabupaten Subang bergerak cepat (Subang Ngabret) menyambut transformasi kawasan utara Jawa Barat sebagai bagian dari Rebana Metropolitan (Pemerintah Kabupaten Subang, 2026). Subang diuntungkan secara geopolitik oleh kehadiran Pelabuhan Internasional Patimban dan lintasan Tol Cipali.

Guna memastikan pertumbuhan industri tidak meninggalkan isu kesejahteraan mendasar rakyat, draf prioritas Subang difokuskan pada:

Nama Daerah	Pimpinan Otoritas	Keunggulan Komparatif	Proyek Terobosan Strategis	Keselarasan Pilar Kedaulatan
Kab. Subang	Reynaldy & Agus Masykur	Rebana Metropolitan & Patimban	KPI Cipali Timur & SPAM Patimban	Kedaulatan Ekonomi & Logistik
Kota Pekanbaru	Wakil Wali Kota	Hub Perdagangan FTZ Sumatra	KIT & Jalan Lingkar 70	Konektivitas & Industri Hijau
Kab. Solok	H. Candra	Panas Bumi (100 MWe)	PLTP Koto Sani (EDC, IDR 2,2 T)	Kedaulatan Energi Terbarukan
Kab. Serang	Ratu & Najib Hamas	Selat Sunda & Pariwisata	Masjid Terapung Banten (MTB)	Kedaulatan Sosial & Religi
Kab. Lima Puluh Kota	Safni & Ahlul Badrito	Pertanian Ekspor (44 Nagari Mandiri)	Hilirisasi Gambir & Tembakau	Kedaulatan Pangan Pedesaan
Kota Bukittinggi	Ibnu Asis	Pariwisata Halal & Perdagangan	Pedestrian City & Akses Tol	Kedaulatan Ekonomi Kreatif

- **Pengembangan KPI Cipali Subang Timur:** Mengintegrasikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan industri dengan penyerapan tenaga kerja lokal secara maksimal.
- **SPAM Patimban:** Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terpadu untuk menyuplai kawasan pelabuhan sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih domestik warga sekitar.
- **Manajemen Ekologis:** Mengakselerasi tata kelola persampahan di TPA Jalupang dan pembangunan TPST Pamanukan, serta membangun sistem pengendalian banjir pesisir (sea wall, breakwater, polder system, dan sheet pile) guna mengamankan investasi maritim dan permukiman nelayan.

Kota Pekanbaru: Hub Perdagangan dan Jasa Sumatera Tengah

Kota Pekanbaru tumbuh menjadi salah satu kota tujuan investasi terbaik di Indonesia. Pekanbaru memosisikan diri sebagai pusat logistik regional melalui penyediaan sarana berkualitas,

"Kota Pekanbaru tumbuh menjadi salah satu kota tujuan investasi terbaik di Indonesia. Pekanbaru memosisikan diri sebagai pusat logistik regional melalui penyediaan sarana berkualitas, kepastian hukum, dan pelayanan perizinan prima."

kepastian hukum, dan pelayanan perizinan prima yang terbukti dengan raihan penghargaan TOP 3 Nasional penyelenggaraan perizinan tenaga medis dari Kemenkes serta predikat Pelayanan Prima dari KemenPAN-RB dengan nilai IKM mencapai $95,52$ (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2025).

Arah investasi strategis Pekanbaru difokuskan pada:

- **Kawasan Industri Tenayan (KIT):** Mengembangkan kawasan industri terpadu berbasis energi ramah lingkungan.
- **Jalan Lingkar 70:** Membuka akses konektivitas logistik guna memotong biaya distribusi barang antarkabupaten di Provinsi Riau.
- **Kawasan Strategis Bandar Kayangan:** Merevitalisasi kawasan pariwisata dan komersial terpadu sebagai magnet baru pertumbuhan ekonomi sektor jasa.

2. Transisi Energi Hijau dan Keberlanjutan Ekologis: Solok dan Serang

Kemandirian energi yang berkeadilan menuntut keberanian daerah untuk mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan (EBT) lokal dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan dan hak sosial masyarakat adat.

Kabupaten Solok: Pelopor Panas Bumi Sumatera

Kabupaten Solok di bawah kepemimpinan Wakil Bupati H. Candra, S.H.I. dianugerahi karakteristik geologi unik patahan besar Sumatra yang menyimpan potensi energi panas bumi (geothermal) yang luar biasa besar (Pemerintah Kabupaten Solok, 2026).

Komitmen transisi energi bersih Solok diwujudkan melalui:

- **PLTP Koto Sani Tanjung Bingkung**: Proyek eksplorasi panas bumi berkapasitas awal 20 MWe (potensi total mencapai 100 MWe) dengan nilai investasi mencapai USD 140 Juta atau setara Rp 2,2 Triliun oleh PT EDC Indonesia.
- **Penanganan Konflik Berbasis Sosialisasi:** Menjawab kekhawatiran masyarakat Sawah Jariang Nagari Koto Sani terkait isu lingkungan,

pemerintah daerah mengedepankan pendekatan persuasif melalui tokoh masyarakat dan survey Geoscience yang aman guna menyelaraskan kepentingan investasi hijau dengan kedaulatan hak ulayat warga.

- **PLTP Surian:** Survei rinci pengembangan area panas bumi di Kecamatan Pantai Cermin dengan potensi spekulatif sebesar 10 MWe.

Kabupaten Serang: Penyangga Logistik Selat Sunda dan Pusat Wisata Religi

Kabupaten Serang memiliki peran strategis ganda sebagai perlintasan utama Pulau Jawa dan Sumatra (Selat Sunda) sekaligus daerah penyangga (hinterland) DKI Jakarta (Pemerintah Kabupaten Serang, 2026). Di bawah kepemimpinan Bupati Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. dan Wakil Bupati H. Muhammad Najib Hamas, S.E., M.M., Serang mengombinasikan kekuatan industri pengolahan dengan pariwisata budaya-religi.

Terobosan pembangunan Serang meliputi:

- **Masjid Terapung Banten (MTB):** Pembangunan ikon spiritual dan wisata religi baru di Kecamatan Cinangka (Desa Sindang Laya dan Kamasan). Proyek ini diselaraskan dengan tata ruang sempadan pantai minimal yang ketat guna mengantisipasi risiko kebencanaan abrasi.
- Konektivitas dan Ekowisata: Mengoptimalkan koridor jalan nasional Anyar untuk mendukung industri jasa kepelabuhanan, perikanan tangkap, dan ekowisata pantai yang menyerap tenaga kerja lokal.

"Kabupaten Lima Puluh Kota sukses mencatatkan prestasi gemilang dalam indeks pembangunan desa. Di bawah kepemimpinan Bupati Safni dan Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha, daerah ini berhasil melakukan lompatan klasifikasi nagari secara eksponensial."

3. Kemandirian Desa, Pariwisata Halal, dan Agropolitan: Lima Puluh Kota dan Bukittinggi

Kedaulatan pangan dan penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal merupakan tameng utama dalam menekan angka kemiskinan di pedesaan. Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Bukittinggi menjadi representasi sempurna dari kebangkitan ekonomi agropolis-kreatif.

Kabupaten Lima Puluh Kota: Kebangkitan Nagari Mandiri dan Ekspor Gambir

Kabupaten Lima Puluh Kota sukses mencatatkan prestasi gemilang dalam

indeks pembangunan desa. Di bawah kepemimpinan Bupati Safni dan Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha, daerah ini berhasil melakukan lompatan klasifikasi nagari secara eksponensial (Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, 2025):

Keberhasilan kemandirian desa ini dipicu oleh:

- Hilirisasi Komoditas Ekspor (Gambir & Tembakau): Memfasilitasi petani lokal dengan bantuan alsintan dan bibit unggul, serta memperluas akses pasar ekspor gambir langsung dari pedesaan ke India dan Eropa melalui penguatan koperasi tani.
- Sinergitas Multi-Pihak: Menggalang kolaborasi intensif antara pemerintah daerah dengan Fraksi PKS DPR RI, kementerian teknis terkait, serta potensi perantau Minang (Diaspora) untuk membiayai proyek-proyek produktif nagari.

Kota Bukittinggi: Episentrum Wisata Halal dan Kota Ramah Pejalan Khaki

Kota Bukittinggi, di bawah kepemimpinan Wakil Wali Kota Ibnu Asis, STP, dihadapkan pada keterbatasan lahan daratan. Oleh karena itu, kota ini memfokuskan pembangunannya pada optimalisasi sektor perdagangan dan

"Paparan program kerja dari enam kepala daerah PKS ini menegaskan satu komitmen penting: kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional hanya dapat tegak apabila daerah diberikan ruang untuk berinovasi mengelola potensinya secara mandiri."

pariwisata kreatif berbasis budaya yang menyumbang 7,3% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pemerintah Kota Bukittinggi, 2026).

Langkah terobosan Bukittinggi meliputi:

- Program Ramah Pejalan Kaki (Pedestrian-Friendly City): Menata trotoar, taman kota, dan penerangan jalan umum terpadu guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan untuk betah berlama-lama menikmati keindahan kota di malam hari.
- Konektivitas Tol Padang-Pekanbaru: Merancang pembangunan jalan penghubung dari pusat kota menuju gerbang tol terdekat guna memperlancar arus kunjungan wisatawan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) nasional dan regional.
- **Ekonomi Kreatif Kuliner Halal:** Standardisasi produk kuliner tradisional Minang melalui sertifikasi halal guna meneguhkan citra Bukittinggi sebagai destinasi wisata halal unggulan dunia.

4. Matriks Orkestrasi Pembangunan Terpadu Enam Daerah

Guna menyinkronkan seluruh terobosan sektoral ini, berikut adalah matriks peta pembangunan terintegrasi dari enam daerah:

Kesimpulan: Mewujudkan Kemandirian dari Daerah untuk Indonesia

Paparan program kerja dari enam kepala daerah PKS ini menegaskan satu komitmen penting: kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional hanya dapat tegak apabila daerah diberikan ruang untuk berinovasi mengelola potensinya secara mandiri.

Melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dari mafia anggaran, kepedulian nyata pada penyediaan infrastruktur dasar rakyat, serta profesionalitas menyusun regulasi investasi hijau, para pejabat publik PKS di daerah siap menjadi garda terdepan penggerak resiliensi nasional. Dengan mengedepankan sinergi lintas wilayah dan koordinasi taktis bersama struktur pusat partai, draf kerja nyata ini siap diwujudkan demi mengembalikan marwah bangsa dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok Indonesia.

4

Laporan Utama

Laporan Utama

Semarak Milad 24 PKS: Dari Solusi Nyata di Akar Rumput hingga Konsolidasi Kedaulatan Bangsa

Oleh: Riyono,
Ketua Pelaksana Milad 23 PKS

Pendahuluan: Melampaui Selebrasi, Mengukir Solusi Nyata

Perayaan hari lahir sebuah gerakan politik sering kali terjebak dalam jebakan formalitas yang megah namun berjarak dari realitas harian masyarakat. Di tengah impitan ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi geopolitik yang tak menentu, serta ancaman nyata krisis pangan dan energi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih jalan yang berbeda pada Milad ke-24 ini. PKS menterjemahkan momentum hari jadinya bukan sebagai panggung pesta pora, melainkan sebagai sebuah gerakan aksi semesta berjenjang dari

pusat hingga anggota di tingkat paling bawah.

Dengan mengusung tema besar "Bersama Rakyat, Menguatkan Ketahanan Indonesia", Milad ke-24 PKS dicanangkan sebagai gerakan yang mengusung prinsip "Solusi Nyata, Sederhana, Berdampak". Gerakan ini membedah tantangan ketahanan bangsa ke dalam tiga pilar aksi taktis yang membumi dan dapat langsung diakses secara mudah serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat: Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Ketahanan Energi.

Ledakan Publikasi: Kick-Off Melalui Podcast Marathon 6 Jam

Kemeriahan Milad ke-24 PKS dihentak ke ruang publik melalui sebuah lompatan inovatif media digital: Podcast Marathon selama 6 Jam Non-Stop (format live streaming 2+4 jam di kanal YouTube resmi partai). Dirancang sebagai instrumen "ledakan publikasi", program ini mendobrak batas kampanye konvensional dengan menghadirkan dialog segar yang memadukan komedi, kepedulian sosial, dan gagasan teknokratis.

Dipandu oleh komedian nasional seperti Narji, Aldi Taher, dan Wawan bersama para komika lokal, podcast ini dibagi ke dalam segmen-segmen tematis yang tajam:

- **Segmen Ekonomi:** Mengha-dirkan diskusi interaktif antara narasumber nasional dengan local heroes—para pelaku UMKM binaan PKS yang sukses bertahan di tengah krisis.
- **Segmen Pangan**: Mengupas tuntas strategi swasembada pedesaan langsung dari Sekolah Tani Ternak Nelayan (STTN) PKS.

- **Segmen Energi**: Memaparkan peta jalan instalasi teknologi surya tepat guna untuk kebutuhan rakyat kecil.
- **Segmen Inspirasi**: Menampilkan pimpinan Fraksi PKS bersama tokoh publik inspiratif, yang diakhiri dengan Kick-Off seremonial oleh Presiden PKS bersama Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS.

1. Pilar Ketahanan Ekonomi: Gerakan "Pasar Kita Semua" & BOEM

Krisis ekonomi makro tidak boleh melumpuhkan geliat perdagangan mikro di daerah. Sebagai bentuk jawaban konkret, PKS meluncurkan program Pasar Kita Semua (PAKIS) dan Business Opportunity Expo (BOEM) dengan target transaksi nasional yang ambisius: 24 Miliar Rupiah.

Strategi eksekusi pilar ekonomi ini memadukan kekuatan taktis fisik di daerah dengan teknologi digital:

- **Bazaar Fisik (Low-Cost, High-Impact):** Memantau halaman kantor-kantor partai di tingkat DPD sebagai ruang pasar murah sederhana. Tanpa biaya sewa yang mencekik, para wirausahawan mikro lokal diberikan panggung untuk mempromosikan produk mereka langsung kepada masyarakat sekitar, sekaligus menghidupkan kembali perputaran uang di tingkat lokal.
- **Ekspansi Digital Terintegrasi**: Seluruh transaksi dan database UMKM binaan diintegrasikan ke dalam platform digital Pasar Kita Semua (PAKIS). Skema ini memperluas jangkauan pasar hingga skala nasional, memastikan produk lokal dari pelosok daerah dapat diakses secara transparan oleh konsumen perkotaan.

2. Pilar Ketahanan Pangan: Dari Edukasi hingga Akses Pasar

PKS meyakini bahwa kedaulatan pangan nasional bermula dari kemandirian para petani, peternak, dan nelayan di pedesaan. Untuk merealisasikan hal tersebut, PKS membangun ekosistem ketahanan pangan terpadu melalui tiga tahapan sirkular (Lihat Gambar)

Tiga Tahapan Sirkular Ekosistem Ketahanan Pangan Terpadu

1. **Edukasi & Kemandirian (Sekolah Tani Ternak Nelayan):** Program strategis DPP PKS yang berfokus mendidik kader dan masyarakat tentang kemandirian pertanian organik, hortikultura, peternakan mandiri, dan metode perikanan modern yang minim biaya namun menghasilkan produk berkualitas tinggi.
2. **Produksi & Kualitas**: Pendampingan berkelanjutan di lapangan untuk memastikan produktivitas lahan terjaga dari ancaman anomali iklim dan keterbatasan pupuk subsidi kimia.
3. **Akses Pasar (Pasar Tani PKS)**: Memotong rantai tengkulak yang eksploitatif dengan mendekatkan hasil panen tani, ternak, dan nelayan kader secara langsung ke meja makan konsumen, baik melalui pasar fisik berkala maupun transaksi digital.

3. Pilar Ketahanan Energi: Energi Bersih Tenaga Surya untuk Rakyat

Salah satu terobosan paling berani dalam Milad ke-24 PKS adalah pelembagaan transisi energi bersih

"PKS menterjemahkan momentum hari jadinya bukan sebagai panggung pesta pora, melainkan sebagai sebuah gerakan aksi semesta berjenjang dari pusat hingga anggota di tingkat paling bawah."

melalui aplikasi Solar System (Tenaga Surya) Tepat Guna yang langsung berdampak pada kehidupan ekonomi rakyat kecil. PKS membuktikan bahwa energi terbarukan tidak harus mahal dan eksklusif.

Beberapa solusi energi surya taktis yang disebarkan di seluruh wilayah nusantara meliputi:

- **Gerai Charger Tenaga Surya Gratis:** Dibangun di setiap kantor DPD PKS dengan kapasitas ~100 Wp (memanfaatkan panel surya, regulator, baterai, dan port USB) dengan estimasi anggaran yang sangat terjangkau (5–7 juta rupiah) guna melayani kebutuhan pengisian daya gawai warga sekitar secara gratis.
- **Rumah Cahaya:** Instalasi listrik surya mandiri di wilayah-wilayah pelosok nusantara yang belum terjangkau listrik PLN secara memadai. Rumah Cahaya difungsikan sebagai pusat aktivitas sosial warga—mulai dari tempat pengajian, belajar kelompok anak-anak sekolah, literasi digital, hingga industri kreatif rumah tangga.
- **Wakaf PLTS Masjid:** Gerakan bersama menggalang dana wakaf untuk memasang panel surya di atap masjid-masjid nusantara guna menghemat tagihan listrik operasional rumah ibadah secara signifikan.
- **Solar System Nelayan & UMKM:** Pemasangan panel surya taktis di perahu nelayan tradisional untuk menyuplai energi mesin motor, lampu tangkap ikan, dan kotak pendingin (freezer) agar nelayan dapat melaut secara mandiri tanpa tercekik mahalnya BBM fosil.
- Solar Pump & Pagar Listrik Pertanian: Pompa air bertenaga surya untuk mengatasi krisis air irigasi di musim kemarau, serta pagar listrik arus diskontinu yang aman untuk mencegah hama perusak tanaman dan menjaga hewan ternak.

Garis Komando dan Pembagian Peran Eksekusi

Agar gerakan semesta ini berjalan masif

"Ketika struktur partai bergandengan tangan dengan para petani, ketika kantor-kantor DPD di daerah menjadi lumbung pengisian daya bersih gratis bagi gawai warga, dan ketika BUMDes serta koperasi lokal sukses membebaskan UMKM dari cengkeraman rentenir, di situlah esensi kedaulatan sejati sedang kita tegakkan."

dan terstruktur, DPP PKS menetapkan garis komando dan pembagian peran yang sangat ketat dari level pusat hingga unit terkecil di lapangan:

- DPP (Pusat): Memegang kendali Kick-off, perumusan kebijakan makro budaya pangan lokal, serta penyusunan model pelaksanaan gerakan.
- DPR RI & Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah: Bertindak sebagai sponsor, fasilitator utama, serta penyusun kebijakan daerah terkait ketahanan ekonomi, pangan, dan energi.
- DPW (Tingkat Provinsi): Bertanggung jawab atas implementasi PLTS tepat guna dan mengawal pembuatan lumbung pangan di kantor-kantor partai wilayah.
- DPD (Tingkat Kabupaten/Kota): Menjadi eksekutor utama di lapangan dalam menyapa tokoh masyarakat, menyelenggarakan Pasar Kita Semua, serta mendistribusikan PLTS tepat guna untuk komunitas perempuan dan UMKM binaan.
- DPC (Tingkat Kecamatan): Menjalankan siaran kampanye PKS Menyapa secara masif langsung ke akar rumput.
- UPA (Unit Pembinaan Anggota): Menggerakkan anggota di tingkat paling bawah untuk melakukan gerakan menanam mandiri di pekarangan rumah serta menginisiasi program "One UPA One Product" (satu kelompok satu produk ekonomi).

Penutup: Bersama Rakyat Menguatkan Indonesia

Milad ke-24 PKS adalah sebuah pembuktian konsistensi khidmat. Dari tanggal 20 April hingga 20 Mei, seluruh penjuru nusantara akan diwarnai oleh semarak gerakan swasembada ini.

Ketika struktur partai bergandengan tangan dengan para petani, ketika kantor-kantor DPD di daerah menjadi lumbung pengisian daya bersih gratis bagi gawai warga, dan ketika BUMDes serta koperasi lokal sukses membebaskan UMKM dari cengkeraman rentenir, di situlah esensi kedaulatan sejati sedang kita tegakkan.

Melalui kerja nyata yang bersih, peduli, dan profesional ini, PKS siap membuktikan diri sebagai lokomotif perubahan yang tidak sekadar berteori di menara gading kekuasaan, melainkan bekerja bersama rakyat di atas tanah kering perjuangan demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil, dan berdaulat sepenuhnya.

4

Sinergitas Legislasi Daerah di Indonesia:

Hubungan Eksekutif-Legislatif Berbasis Maqashid Syariah dan Kemaslahatan Publik

Hakikat Otonomi Daerah dan Fondasi Konstitusional Kemitraan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didesain berdasarkan prinsip desentralisasi kekuasaan demi mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat lokal (Republik Indonesia, 2014; Damanik, 2020). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, roda pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dijalankan oleh Pemerintah Daerah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan setara dan bersifat kemitraan (Damanik, 2020; Setiawan, 2014; Setiawan, 2017). Kedudukan setara ini mengindikasikan hubungan kerja yang sejajar, di mana tidak ada lembaga yang saling membawahi (Setiawan, 2017). Sifat kemitraan tersebut mewajibkan kedua lembaga untuk memelihara hubungan kerja yang harmonis guna merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan daerah demi kemaslahatan publik secara kolaboratif (Damanik, 2020; Setiawan, 2017).

Kemitraan strategis ini teoretisnya mewujud nyata dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) (Setiawan, 2014). DPRD memegang mandat representasi rakyat melalui tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Lasut, 2018). Sementara itu, Pejabat Publik—meliputi Gubernur pada tingkat provinsi serta Bupati dan Walikota pada tingkat kabupaten/kota—bertindak sebagai pelaksana utama kebijakan sekaligus inisiator program pembangunan (Republik Indonesia, 2014). Gubernur memiliki peran ganda, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil Pemerintah Pusat di wilayah administratif provinsi, yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota (Republik Indonesia, 2014).

Dalam konteks otonomi daerah, pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Urusan konkuren ini dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib (terdiri atas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta non-pelayanan dasar) dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Wewenang yang dimiliki daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya diperoleh melalui tiga sumber mandat utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat (Setiawan, 2014). Namun, otonomi seluas-luasnya ini bukanlah kebebasan tanpa batas (Suharizal, 2012). Produk hukum daerah berupa Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kepentingan umum (Suharizal, 2012). Kepentingan umum didefinisikan secara yuridis sebagai kebijakan yang tidak boleh mengganggu kerukunan antarwarga masyarakat, tidak menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, serta tidak menghalangi aktivitas ekonomi yang adil. Oleh karena itu, sinergitas pembentukan regulasi antara eksekutif dan legislatif membutuhkan proses harmonisasi yang ketat, salah satunya melalui pendampingan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas regulasi di lapangan (Kanwil Kemenkumham Kalteng, 2026).

Otonomi seluas-luasnya ini bukanlah kebebasan tanpa batas. Produk hukum daerah berupa Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kepentingan umum."

Integrasi Maqashid Syariah dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks sosiokultural Indonesia yang bercorak agamis dan plural, integrasi nilai-nilai keislaman universal ke dalam sistem hukum nasional merupakan keniscayaan historis dan konstitusional (Zayadi, 2024; Rohmanu, 2021; Bakri, 1996). Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", meletakkan dasar moral keagamaan bagi setiap produk hukum di Indonesia (Mu'alim, 2022). Salah satu konsep hukum Islam yang sangat fleksibel dan relevan untuk ditranslasi-kan ke dalam kebijakan publik modern adalah Maqashid Syariah (Asy-Syatibi, 2007).

Secara konseptual, Maqashid Syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat (maslahah 'ammah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) (Asy-Syatibi, 2007; Novianto dan Nisa, 2024; Darma, 2022). Struktur Maqashid Syariah diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu Daruriyyat (primer), Hajiyyat (sekunder), dan Tahsiniyat atau Tazyinat (tersier/ pelengkap) (Mu'alim, 2022; Mahfud MD, 2025). Di antara ketiga tingkatan tersebut, hanya tingkatan Daruriyyat yang dapat secara mandiri dijadikan pedoman utama dalam penetapan hukum Islam tanpa memerlukan dalil penguat tambahan, sementara tingkat Hajiyyat dan Tahsiniyat membutuhkan dalil pendukung agar dapat diintegrasikan sebagai landasan hukum (Mu'alim, 2022). Tingkat Daruriyyat ini berfokus pada perlindungan lima elemen dasar kehidupan (al-daruriyyat al-khamsah), yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz

"Secara kelembagaan, Bapemperda DPRD sebagai motor penggerak legislasi lokal sering kali diposisikan tidak strategis dan dinomorduakan di bawah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya, seperti Komisi atau Badan Anggaran."

al-mal) (Asy-Syatibi, 2007; Novianto dan Nisa, 2024; Abu Zahrah, 1958).

Internalisasi prinsip-prinsip ini ke dalam tata hukum Indonesia sejalan dengan pandangan pakar hukum tata negara, Moh. Mahfud MD, yang memandang hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil nasional yang memiliki kedudukan setara dengan hukum Barat dan hukum adat (Mahfud MD, 2025). Mahfud MD menekankan bahwa formalisasi hukum Islam ke dalam Perda Syariah harus dilakukan melalui proses "eklektisasi", yaitu memilih dan menyerap nilai-nilai universal terbaik dari hukum Islam yang kompatibel dengan kepentingan nasional dan keberagaman masyarakat Indonesia (Mahfud MD, 2025). Kajian ini relevan dengan klasifikasi ruang lingkup syariat kategori amaliyyah (praktis) oleh Abdul Wahab Khallaf yang membagi aktivitas hukum menjadi tujuh bagian, termasuk hukum keluarga, muamalah ekonomi, hingga tata negara dan peradilan (Bakri, 1996). Nilai-nilai ini teoretisnya telah menjiwai berbagai regulasi nasional, seperti regulasi agraria, perlindungan anak, hingga undang-undang cipta kerja.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan pemahaman yang cukup signifikan di tengah masyarakat dan aparatur hukum di Indonesia (Rohmanu, 2021). Berdasarkan data penelitian, hanya sekitar 40% masyarakat yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai hakikat Maqashid Syariah, sementara 60% sisanya—termasuk di dalamnya hakim dan pembuat undang-undang—cenderung menginterpretasikan konsep ini secara sempit dan stekstual berdasarkan satu mazhab tertentu saja, khususnya mazhab Syafi'i (Rohmanu, 2021). Untuk menjembatani kesenjangan interpretasi tersebut, diperlukan tiga pendekatan sistematis dan terukur dalam integrasi kebijakan publik:

- **Pendekatan Tekstual:** Memberikan landasan normatif dan teologis yang kuat yang bersumber langsung dari teks keagamaan otoritatif.
- **Pendekatan Kontekstual:** Memastikan relevansi, kelenturan, dan kesiapan implementasi hukum di tengah dinamika sosial-politik kontemporer.
- **Pendekatan Partisipatif:** Melibatkan seluruh elemen masyarakat guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan rasa kepemilikan publik atas regulasi yang dilahirkan.

Tabel 1: **Kerangka Kerja Internalisasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Publik Indonesia** (Zayadi, 2024; Anoraga, 2024; Ridho, 2024).

Elemen Maqashid Syariah	Tingkat Kebutuhan	Transkripsi ke dalam Regulasi Nasional & Daerah	Contoh Aplikasi Kebijakan Publik
Hifz al-Din (Agama)	Daruriyyat	Pengakuan hak beragama & fasilitas keagamaan (Zayadi, 2024).	Perda Fasilitasi Pesantren, Undang-Undang Perbankan Syariah (Newsroom Diskominfosantik Bekasi, 2021; Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021).
Hifz al-Nafs (Jiwa)	Daruriyyat	Jaminan kesehatan, hak hidup, lingkungan sehat.	Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), standardisasi keselamatan kerja (Anoraga, 2024).
Hifz al-'Aql (Akal)	Daruriyyat	Akses pendidikan layak, perlindungan mental.	Beasiswa daerah, fasilitas rehabilitasi zat adiktif, perda ketertiban umum.
Hifz al-Nasl (Keturunan)	Daruriyyat	Perlindungan anak & penguatan ketahanan keluarga.	Sanksi berat kejahatan anak, pencegahan kekera-san dalam rumah tangga.
Hifz al-Mal (Harta)	Daruriyyat	Distribusi kekayaan adil, perlindungan hak milik (Novianto dan Nisa, 2024).	Perda Zakat Produktif, penataan ruang bagi PKL, regulasi transaksi digital (Ridho, 2024; Skripsi IAIN Parepare, 2022).

Hambatan Struktural, Kompetensi, dan Dinamika Politik Legislasi Daerah

Dalam praktiknya, kemitraan sejajar antara Kepala Daerah dan DPRD kerap kali mengalami ketimpangan (Lasut, 2018; Irham, 2022). Dominasi eksekutif (executive heavy) masih menjadi karakteristik utama dalam proses legislasi di daerah (Lasut, 2018; Irham, 2022). Ketimpangan produktivitas draf regulasi ini disebabkan oleh berbagai hambatan kelembagaan, masalah kompetensi, serta pengaruh konfigurasi politik patronase di tingkat lokal (Irham, 2022; Ariyanto & Mauristha, 2021; Ishak, 2016).

Secara kelembagaan, Bapem-perda DPRD sebagai motor penggerak legislasi lokal sering kali diposisikan tidak strategis dan dinomorduakan di bawah

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya, seperti Komisi atau Badan Anggaran (Jurnal Pencerah, 2022). Penempatan anggota dewan di Bapemperda pun kerap kali diabaikan, sehingga komisi ini hanya mendapatkan anggota "sisa" yang tidak terakomodasi di AKD lain (Jurnal Pencerah, 2022).

Bapemperda juga mengalami kendala operasional yang sangat krusial, seperti keterbatasan anggaran mandiri untuk sosialisasi Raperda, tiadanya pos anggaran perjalanan dinas independen, serta kondisi staf yang sangat terbatas (understaffed)—di mana pada beberapa kasus Bapemperda tingkat provinsi hanya dibantu oleh dua orang staf Aparatur Sipil Negara (ASN) (Jurnal Pencerah, 2022). Keterbatasan ini membuat Bapemperda kewalahan dan sering kali gagal melaksanakan instrumen legislasi yang vital, seperti Analisis Kebutuhan Perda (AKP).

Kelemahan internal ini diperparah oleh rendahnya kompetensi anggota legislatif dalam menyusun draf regulasi (Ishak, 2016). Mayoritas anggota DPRD tidak dibekali latar belakang pendidikan hukum, yang berakibat pada ketergantungan mutlak terhadap naskah akademik dari pihak eksekutif atau kegagalan merumuskan draf inisiatif sendiri yang metodologis (Ishak, 2016). Sebagai contoh empiris, di Kabupaten Langkat pada periode 2014–2019, dominasi usulan inisiatif eksekutif jauh melampaui usulan legislatif yang berhasil disahkan menjadi Perda (Ariyanto & Mauristha, 2021).

Ketimpangan legislasi di Kabupaten Langkat tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh struktur politik patron-client (Ariyanto & Mauristha, 2021). Bupati Langkat pada periode tersebut merangkap jabatan sebagai Ketua DPD Partai Golkar

tingkat provinsi, partai dominan di DPRD setempat. Hubungan patron-klien yang timpang ini membatasi daya kritis dan independensi anggota legislatif, karena mereka merasa berutang budi secara politik kepada kepala daerah yang memegang kendali kepengurusan partai di tingkat atas.

Sering kali, proses legislasi hanya menjadi ajang legitimasi formal bagi kepentingan eksekutif tanpa adanya partisipasi publik yang bermakna. Konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif juga kerap memuncak pada saat pembahasan APBD, khususnya terkait usulan aspirasi pembangunan daerah dari hasil reses anggota DPRD yang tidak diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) eksekutif (Sinergitas, 2014). Tarik-ulur ini berpotensi memicu kebuntuan politik yang menunda pengesahan anggaran dan merugikan pelayanan publik bagi masyarakat luas (Sinergitas, 2014; Puspen Kemendagri, 2025).

Pembuktian Empiris Kemaslahatan: Analisis Kasus Sukses dan Kritik Perda Syariah

Meskipun dinamika politik lokal menyajikan tantangan yang kompleks, beberapa daerah di Indonesia berhasil menelurkan produk hukum inovatif yang secara konkret merealisasikan kemaslahatan publik dan pemberdayaan umat Islam (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021; Ridho, 2024; Newsroom Diskominfosantik Bekasi, 2021). Sinergi positif ini menghasilkan beberapa percontohan regulasi yang sukses mengintegrasikan nilai universal keagamaan ke dalam kebijakan publik (Anoraga, 2024; Newsroom Diskominfosantik Bekasi, 2021).

- **Regulasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren**

Provinsi Jawa Barat menjadi pelopor nasional dengan mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021). Pengesahan ini dilakukan melalui kolaborasi intensif antara Pansus VII DPRD Jawa Barat dan Gubernur Ridwan Kamil. Lahirnya perda ini didasarkan pada kenyataan sosiologis sosiokultural masyarakat Jawa Barat

"Bapemperda juga mengalami kendala operasional yang sangat krusial, seperti keterbatasan anggaran mandiri untuk sosialisasi Raperda, tiadanya pos anggaran perjalanan dinas independen, serta kondisi staf yang sangat terbatas (understaffed)."

yang menempatkan pesantren sebagai subkultur kuat yang mengakar di tengah masyarakat (Kanwil Kemenag Jawa Barat, 2021). Perda ini memberikan kepastian hukum bagi ribuan pesantren tradisional untuk mendapatkan fasilitasi dari APBD daerah dalam tiga peran utamanya: fungsi pendidikan, fungsi dakwah (penyebaran ajaran Islam Rahmatan lil 'Alamin), dan fungsi pemberdayaan masyarakat (Kanwil Kemenag Jawa Barat, 2021).

Di tingkat kabupaten, regulasi ini diterjemahkan secara aplikatif melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 21 Tahun 2025 yang menjamin fasilitasi fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme hibah daerah (Bupati Bogor, 2025). Aturan pelaksanaan ini secara progresif melibatkan koperasi di lingkungan pesantren untuk memicu kemandirian ekonomi santri dan warga sekitar (Bupati Bogor, 2025).

Pengelolaan Zakat Produktif berbasis Maqashid Syariah

Di Kabupaten Lombok Tengah, sinergi legislasi mewujud melalui Perda Pengelolaan Zakat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Republik Indonesia, 2011). Regulasi ini mewajibkan BAZNAS kabupaten diisi oleh pimpinan dari unsur ulama, tokoh masyarakat, dan profesional medis/ekonomi (Bupati Lombok Tengah, 2011). Selain itu, bukti setor zakat masyarakat secara legal diakui sebagai pengurang langsung dari penghasilan kena pajak bruto pembayar zakat (Bupati Lombok Tengah, 2011).

Pemanfaatan zakat secara produktif ini diimplementasikan secara metodologis oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Sebesar 65% dana zakat dikelola secara produktif sebagai modal usaha mustahik, 20% konsumtif, 10% santunan sosial, dan 5% operasional amil. Kajian atas implementasi ini merujuk pada

teori Maqashid Syariah Ibnu Asyur melalui tiga pendekatan:

- **Maqam al-Khitab al-Syar'iy** (konteks pesan syariat),
- **At-Tamyiz bayna al-Wasilah wa al-Maqsud** (membedakan sarana dan tujuan utama), dan
- **Al-Istiqra'** (metode induksi tematik).

BAZNAS Jember mengadopsi hadis tentang kebolehan memperdagangkan harta anak yatim agar tidak habis termakan zakat, yang ditafsirkan sebagai legalitas memproduktifkan harta zakat agar mustahik berkembang menjadi muzaki baru. Secara makro, pengelolaan aset produktif ini sejalan dengan prinsip Hifz al-Mal (perlindungan harta). Sistem bagi hasil kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah berbasis nilai kerja sama (ta'awun) digunakan untuk mengentaskan ketimpangan sosial dan membebaskan masyarakat bawah dari ketergantungan kredit berbunga yang eksploitatif. Lebih lanjut, internalisasi nilai Maqashid Syariah ini dinilai krusial tidak hanya dalam transaksi konvensional, tetapi juga dalam ekosistem transaksi digital (e-commerce) guna menjamin keadilan distributif bagi pelaku ekonomi mikro.

"Mayoritas anggota DPRD tidak dibekali latar belakang pendidikan hukum, yang berakibat pada ketergantungan mutlak terhadap naskah akademik dari pihak eksekutif atau kegagalan merumuskan draf inisiatif sendiri yang metodologis."

Kebijakan Kesehatan Publik dan Penataan Sosial

Dalam aspek perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs), Pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berdasarkan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kebijakan ini bertujuan melindungi hak setiap warga untuk menghirup udara bersih, bebas dari paparan nikotin dan tar, demi menjaga kesehatan fisik dan biologis masyarakat.

Sementara di Kabupaten Pinrang, penerapan Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mengatur aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar dianalisis menggunakan pisau bedah Maqashid Syariah (Skripsi IAIN Parepare, 2022). Regulasi ini berhasil menyeimbangkan antara perlindungan hak pejalan kaki atas trotoar yang aman dengan hak ekonomi PKL untuk mencari nafkah halal demi pemenuhan kebutuhan dasar hidup keluarganya (Skripsi IAIN Parepare, 2022).

Telaah Kritis atas Perda Syariat di Indonesia

Di sisi lain, potret formalisasi hukum Islam melalui Perda Syariat di beberapa wilayah di Indonesia (seperti di Provinsi Aceh yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) tidak luput dari kritik akademis dan pegiat hak asasi manusia (Umar, 2021). Beberapa perda yang mengatur kewajiban busana muslimah secara ketat di ruang publik, larangan berduaan (khalwat), pembatasan aktivitas malam bagi perempuan, hingga sanksi pidana fisik seperti hukuman cambuk dinilai memicu polarisasi sosial (Umar, 2021).

Kritik mengemuka bahwa penerapan sanksi-sanksi tersebut berpotensi mengabaikan hak-hak warga non-Muslim yang terpaksa beradaptasi dengan hukum keagamaan tertentu, membatasi kebebasan berekspresi, serta menimbulkan bias gender yang merugikan posisi perempuan dalam ranah sosial-ekonomi (Umar, 2021). Evaluasi kritis ini menegaskan pentingnya proses formulasi perda syariah yang tidak semata-mata mengedepankan aspek formalisme hukum keagamaan yang kaku, melainkan harus tetap mengedepankan nilai inklusivitas, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas demi tercapainya esensi sejati Rahmatan lil 'Alamin.

Dampak Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah terhadap Sinergitas Politik

Mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terus mengalami transformasi regulasi yang dinamis (Suharizal, 2012; Sarbaini, 2020; Yance, 2025). Berdasarkan catatan sejarah konstitusi, mekanisme pengisian jabatan kepala daerah telah berulang kali bergeser (Sarbaini, 2020):

- **UU Nomor 1 Tahun 1945:** Pemilihan kepala daerah diselenggarakan sepenuhnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- **UU Nomor 22 Tahun 1948**: Kepala daerah dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan daftar calon yang diajukan oleh DPRD.
- **UU Nomor 1 Tahun 1957 hingga UU Nomor 5 Tahun 1974**: Kepala daerah dipilih melalui DPRD dengan pengawasan dan kontrol ketat dari Pemerintah Pusat.
- **UU Nomor 22 Tahun 1999**: Kepala daerah dipilih oleh DPRD tanpa intervensi langsung pusat, yang berakibat pada munculnya fenomena "raja-raja kecil" di daerah karena legitimasi politik kepala daerah sepenuhnya bersandar pada konsensus elite parlemen tanpa keterlibatan langsung rakyat.
- **UU Nomor 32 Tahun 2004 hingga UU Nomor 23 Tahun 2014**: Mengadopsi mekanisme Pilkada langsung oleh rakyat, yang memungkinkan munculnya calon perseorangan (independen) guna memperkuat kedaulatan rakyat langsung.

Perdebatan mengenai efektivitas mekanisme Pilkada langsung versus tidak langsung (melalui DPRD) tetap menjadi diskursus hangat di kalangan pakar hukum tata negara (Yance, 2025; Rullyandi, 2024). Masing-masing sistem memiliki dampak politik dan operasional yang signifikan terhadap jalinan sinergi eksekutif-legislatif di daerah (Yance, 2025).

Tabel 2: **Komparasi Dampak Mekanisme Pilkada terhadap Tata Kelola dan Hubungan Lembaga Daerah** (Sarbaini, 2020; Rullyandi, 2024; Adil et al., 2023).

Parameter Perbandingan	Pilkada Langsung (Oleh Rakyat)	Pilkada Tidak Langsung (Oleh DPRD)
Sumber Legitimasi Politik	Berasal langsung dari mandat rakyat secara demokratis di bilik suara (Sarbaini, 2020).	Berasal dari perwakilan politik (faksi-faksi di parlemen daerah).
Pola Akuntabilitas Kepala Daerah	Bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat pemilih	Bertanggung jawab secara politik kepada koalisi fraksi DPRD. sss

Parameter Perbandingan	Pilkada Langsung (Oleh Rakyat)	Pilkada Tidak Langsung (Oleh DPRD)
Estimasi Biaya Politik	Sangat tinggi, baik bagi penyelenggara (APBD/ APBN) maupun calon kepala daerah (Rullyandi, 2024).	Jauh lebih murah dan efisien bagi anggaran negara dan biaya kampanye (Rullyandi, 2024).
Kerentanan Transaksi Politik	Rentan terhadap praktik politik uang (money politics) massal dan politik identitas (Adil et al., 2023).	Rentan terhadap transaksi politik transaksional di tingkat elite fraksi dewan.
Dampak Konflik Horizontal	Tinggi, berpotensi memicu polarisasi sosial di tengah masyarakat plural.	Rendah, konflik diredam di dalam ruang sidang parlemen daerah.
Dampak Sinergi Eksekutif-Legislatif	Sering terjadi kemacetan regulasi (deadlock) jika faksi pendukung minoritas di dewan.	Relatif lebih harmonis dan kooperatif karena keselarasan visi pembangunan sejak awal.

Para pakar hukum tata negara menilai bahwa wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi jika tidak dibarengi dengan jaminan transparansi faksi dewan, karena kedaulatan rakyat dapat dengan mudah disalahgunakan untuk transaksi kepentingan elite partai politik yang bersifat sentralistik. Sebaliknya, jika Pilkada langsung terus dipertahankan tanpa adanya reformasi sistem pemilu, biaya tinggi dan ancaman perpecahan kerukunan warga akan terus membayangi jalannya pembangunan daerah.

Rekomendasi Strategis dan Aplikatif bagi Pejabat Publik dan Legislator Daerah

Berdasarkan analisis komprehensif atas dinamika hubungan eksekutif-legislatif di Indonesia, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis guna membangun sinergitas legislasi yang berpihak pada rakyat kecil serta mencerminkan keluhuran prinsip Rahmatan lil 'Alamin:

1. Rekonstruksi Kelembagaan dan Anggaran Bapemperda DPRD

Pimpinan DPRD bersama dengan fraksi-fraksi harus melakukan reformasi penempatan anggota di Bapemperda. Anggota dewan yang ditugaskan harus memiliki integritas, kapasitas keilmuan hukum, serta komitmen energi yang

besar untuk merancang produk legislasi, bukan sekadar penempatan formalitas anggota sisa. Sekretariat DPRD wajib menyusun anggaran khusus dan mandiri bagi Bapemperda untuk membiayai program Analisis Kebutuhan Perda (AKP), penyusunan Naskah Akademik yang bekerja sama dengan akademisi universitas setempat, serta program sosialisasi perda baru kepada masyarakat. Jumlah staf ahli fungsional perancang perundang-undangan (legislative drafters) di lingkungan DPRD juga harus ditambah secara signifikan guna mengimbangi dominasi draf eksekutif.

2. Standardisasi Proses Eklektisasi Nilai Keagamaan Universal

Dalam penyusunan perda yang bersentuhan dengan dimensi keagamaan (seperti Perda Pesantren, Zakat, atau Ketertiban Umum), tim penyusun naskah akademik eksekutif maupun legislatif harus menggunakan tiga pendekatan integratif: tekstual, kontekstual, dan partisipatif secara seimbang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dilahirkan tidak jatuh pada formalisme kaku yang mencederai hak warga minoritas atau membatasi hak asasi perempuan, melainkan benar-benar berfokus pada esensi perlindungan lima

elemen pokok kemanusiaan (al-daruriyyat al-khamsah). Setiap rancangan perda syariah wajib diuji dampak kemaslahatannya secara inklusif di hadapan seluruh elemen masyarakat lintas agama dan kelompok adat sebelum disahkan (Zayadi, 2024).

3. Institusionalisasi Harmonisasi Regulasi dengan Kementerian Hukum dan HAM

Guna mencegah pembatalan perda atau penolakan Raperda pada tahap evaluasi provinsi maupun pusat karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, Pejabat Publik dan DPRD wajib menginstitusikan proses harmonisasi sejak draf awal diajukan. Kerja sama intensif dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui tim perancang peraturan perundang-undangan harus dijadikan tahapan wajib dalam tata tertib pembuatan produk hukum daerah, guna memastikan keselarasan vertikal dan horisontal regulasi (Kanwil Kemenkumham Kalteng, 2026).

4. Mitigasi Konflik Fiskal APBD dan Pengamanan Anggaran Publik

Untuk meredam ketegangan politik tahunan antara Kepala Daerah dan DPRD terkait penyusunan APBD, TAPD eksekutif bersama Badan Anggaran DPRD harus membangun mekanisme integrasi digital perencanaan pembangunan. Usulan program pembangunan yang diperoleh dewan pada masa reses harus diinput secara transparan ke dalam sistem e-planning daerah dan diverifikasi secara ketat berdasarkan skala prioritas pelayanan dasar wajib masyarakat. Kementerian Dalam Negeri bersama aparat pengawas internal pemerintah (APIP) daerah harus melakukan pengawasan ketat agar postur APBD benar-benar dilindungi dari penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan elektoral atau koruptif, serta memastikan penyerapan belanja daerah terfokus pada kemaslahatan rakyat banyak (Puspen Kemendagri, 2025).

Daftar Pustaka

Abu Zahrah, M. (1958). Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Adil, M., Rachmiatun, S., & Suhendra, B. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Penjabat kepala daerah Secara Langsung Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1(2), 115-129.

Anoraga, M. B. (2024). Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam Optik Maqosid Syariah di Kota Pekalongan. Manabia: Journal of Constitutional Law, 3(1), 139-154.

Ariyanto, H. H., & Mauristha, Z. (2021). Desain Kelembagaan Pemilihan Kepala Daerah Melalui Perwakilan. Pamali: Jurnal Hukum, 1(2).

Asy-Syatibi, A. I. (2007). Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah. Beirut: Al-Maktabah al-Asriyyah.

Bakri, J. (1996). Konsep Maqashid Syariah dalam Hukum Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Bupati Bogor. (2025). Peraturan Bupati Bogor Nomor 21 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Cibinong: JDIH Kabupaten Bogor.

Bupati Lombok Tengah. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pengelolaan Zakat. Praya: JDIH Lombok Tengah.

Damanik, J. R. (2020). Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Perda di Era Otonomi. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 121–135.

Darma. (2022). Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi. Journal of Sharia and Economic Law, 2(1).

Irham, I. (2022). Analisis Hambatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Langkat. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(24), 301-309.

Ishak. (2016). Produktivitas Legislasi DPRD Kota dan Kabupaten di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 1(1).

Jurnal Pencerah. (2022). Hambatan Internal dan Eksternal Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Pencerah, 11(2), 44-55.

Kanwil Kemenag Jawa Barat. (2021). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Bandung: Biro Hukum dan HAM Jawa Barat.

Kanwil Kemenkumham Kalteng. (2026). Sinergi DPRD Katingan dan Kanwil Kemenkumham Kalteng: Raperda Pilkades Katingan Dimatangkan. Palangkaraya: Kemenkumham Kalteng.

Lasut, F. M. (2018). Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Lex Administratum, 6(4).

Mahfud MD, M. (2025). Formalisasi Hukum Islam Berbasis Perda Syariah dalam Konfigurasi Politik Lokal. Jurnal Assiyadah, 4(1).

Mu'alim, A. (2022). Internalisasi Maqashid Syariah dalam Sistem Hukum Nasional. Yogyakarta: UII Press.

Newsroom Diskominfosantik Bekasi. (2021). Pertama di Indonesia, Jawa Barat Sahkan Perda Pesantren. bekasikab.go.id.

Novianto, A., & Nisa, K. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis. Maslahah: Jurnal Ekonomi, 3(3), 325-335.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2021). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Bandung: JDIH Jawa Barat.

Puspen Kemendagri. (2025). Kemendagri Minta DPRD Sinergi dengan Kepala Daerah Perkuat Pelaksanaan Fungsi Anggaran. Jakarta: Kemendagri RI.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Ridho, H. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Komunitas Perspektif Maqashid as-Syariah Ibnu Asyur. Proceedings Jurnal FEBI UIN Kediri.

Rohmanu, A. (2021). Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. Arena Hukum, 13(2), 314–328.

Rullyandi, M. (2024). Pakar Hukum Tata Negara Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Minim Biaya. Jakarta: iNews.

Sarbaini, S. (2020). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), 107.

Setiawan. (2014). Sekilas Tentang Penyelenggara Pemerintah Daerah. Surakarta: Aryhaeko Sinergi Persada.

Setiawan, A. A. (2017). Sinergitas Hubungan DPRD dan Kepala Daerah dalam Pembentukan Perda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Hukum, Universitas Mataram.

Sinergitas. (2014). Membangun Sinergitas Eksekutif-Legislatif dalam Pengelolaan APBD. Jakarta: Neliti Repository.

Suharizal. (2012). Pemilihan Kepala Daerah: Regulasi, Dinamika, dan Tantangan. Jakarta: Grafika.

Skripsi IAIN Parepare. (2022). Efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Trotoar Lapangan Lasinrang Park Kota Pinrang (Tinjauan Maqashid Syariah). Parepare: Repository IAIN Parepare.

Umar, H. N. (2021). Dilema Formalisasi Hukum Islam melalui Perda Syariat di Indonesia. Banda Aceh: Jurnal Al-Qalam.

Yance. (2025). Desain Kelembagaan Pemilihan Kepala Daerah Melalui Perwakilan. Jurnal Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada.

Zayadi, A. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Keberagaman. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Koaposisi

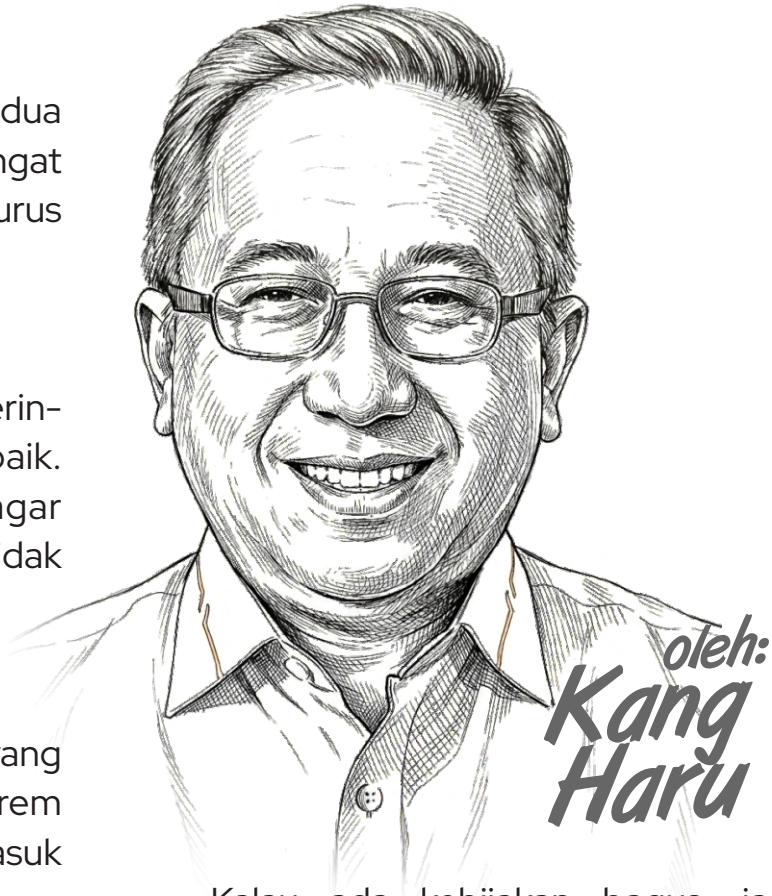

Dalam dunia politik, ada dua makhluk yang sudah sangat dikenal sejak zaman dinosaurus politik masih berkeliaran di televisi.

Namanya Koalisi dan Oposisi.
Koalisi tugasnya mendukung pemerintahan agar program berjalan baik. Oposisi tugasnya mengawasi agar pemerintahan tidak salah jalan, tidak salah belok, apalagi salah parkir.

Keduanya penting.
Ibarat sepeda, koalisi adalah pedal yang menggerakkan. Oposisi adalah rem yang mengingatkan agar tidak masuk jurang.

Masalah muncul ketika ada makhluk baru yang tidak tercatat dalam buku ilmu politik mana pun.

Namanya: Koaposisi.
Koaposisi adalah spesies langka yang pagi menjadi koalisi, siang menjadi oposisi, malam menjadi pengamat independen, dan besok paginya lupa sedang berada di posisi apa.

Ketika pemerintah berhasil, ia berkata, "Itu karena kritik kami."

Ketika pemerintah dikritik publik, ia berkata, "Itu bukan tanggung jawab kami."

Kalau ada kebijakan bagus, ia mengaku bagian dari tim.

Kalau ada kebijakan yang tidak populer, mendadak merasa berada di luar lingkaran.

Singkatnya, ia ingin mendapat pahala koalisi sekaligus popularitas oposisi.

Padahal politik bukan warung prasmanan tempat mengambil lauk yang enak saja.

Harus ada kejelasan posisi.
Karena rakyat berhak tahu siapa yang mendukung dan siapa yang mengawasi.

Bagi kader PKS yang saat ini sebagai pejabat publik baik di Eksekutif

maupun Legislatif berada dalam koalisi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebenarnya tidak ada dilema yang rumit.

Kalau memang berada dalam koalisi, ya jadilah koalisi yang dewasa.

Mendukung program yang baik. Membantu menyukseskan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. Menjadi bagian dari solusi.

Bukan setiap hari sibuk mencari mikrofon untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih galak daripada pihak oposisi.

Kadang ada fenomena menarik.
Ada yang berada dalam koalisi tetapi kritiknya lebih keras daripada oposisi.
Lebih nyinyir daripada pengamat. Lebih marah daripada demonstran. Kalau begini, rakyat juga bingung.

"Ini sebenarnya ikut pemerintah atau sedang melawan pemerintah?"

Kritik tentu boleh. Bahkan harus. Tetapi kritik bukanlah pertunjukan seni bela diri. Tujuannya bukan mencari tepuk tangan. Tujuannya memperbaiki keadaan.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kritis dan sinis.

Kritis menggunakan data. Sinis menggunakan emosi. Kritis menawarkan solusi. Sinis hanya memperbanyak keluhan.

Kritis membuat pemerintahan lebih baik. Sinis hanya memperpanjang kebisingan.

PKS sejak lama membawa gagasan tentang politik yang Bersih, Peduli, Profesional dan berkarakter Negarawan.

Negarawan berbeda dengan politisi biasa.

Politisi sering berpikir tentang pemilu berikutnya. Negarawan berpikir tentang generasi berikutnya.

Politisi bertanya, "Apa keuntungan politiknya?" Negarawan bertanya, "Apa manfaatnya bagi rakyat?"

Karena itu, kader apalagi Pejabat Publik PKS yang berada di pemerintahan maupun legislatif tidak perlu terjebak dalam kompetisi siapa paling keras mengkritik.

Yang lebih penting adalah siapa

Kader apalagi Pejabat Publik PKS yang berada di pemerintahan maupun legislatif tidak perlu terjebak dalam kompetisi siapa paling keras mengkritik. Yang lebih penting adalah siapa paling banyak bekerja. Siapa paling banyak menyelesaikan masalah. Siapa paling banyak menghadirkan manfaat.

paling banyak bekerja. Siapa paling banyak menyelesaikan masalah. Siapa paling banyak menghadirkan manfaat.

Bagi pejabat publik PKS yang berada di eksekutif, baik kepala daerah, wakil kepala daerah maupun pejabat lainnya, ukuran keberhasilan bukan seberapa sering muncul di media sosial. Melainkan seberapa banyak persoalan rakyat yang selesai. Jalan rusak diperbaiki. Pelayanan publik dipercepat. Kemiskinan ditekan. Lapangan kerja diperluas. Birokrasi dipermudah.

Karena rakyat tidak bisa makan caption. Rakyat membutuhkan hasil.

Sementara bagi anggota legislatif PKS, perannya juga jelas.

Menjadi pengawas yang objektif. Menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Menjadi penjaga anggaran. Menjadi mitra strategis pemerintah. Bukan stempel karet.

Tapi juga bukan tukang marah profesional. Kalau ada kebijakan yang benar, dukung. Kalau ada yang keliru, ingatkan. Kalau ada masalah, bantu cari jalan keluar.

Sesederhana itu.
Pada akhirnya, politik yang sehat membutuhkan kejelasan sikap.

Koalisi ya koalisi.
Oposisi ya oposisi.

Keduanya terhormat selama dijalankan dengan tanggung jawab. Yang bermasalah adalah ketika seseorang berubah menjadi Koaposisi. Makhluk politik yang ingin berada di semua sisi sekaligus. Ingin menikmati keuntungan koalisi, tetapi tetap ingin memperoleh popularitas oposisi.

Padahal rakyat tidak membutuhkan akrobat politik.

Rakyat membutuhkan kerja nyata.
Mereka tidak terlalu peduli siapa yang paling keras berbicara. Mereka lebih peduli siapa yang paling banyak bekerja. Karena sejarah biasanya tidak mencatat siapa yang paling ribut. Sejarah mencatat siapa yang paling bermanfaat.

Maka bagi kader PKS yang hari ini mendapat amanah di pemerintahan, pesannya sederhana.

Tetaplah Bersih.
Tetaplah Peduli.
Tetaplah Profesional.
Terus berusaha keras
menjadi Negarawan.

Tetaplah kritis dan rasional. Dukung yang benar.

Koreksi yang keliru. Kerjakan yang menjadi tanggung jawab.

Dan yang paling penting, jangan berubah menjadi Koaposisi. Karena dalam politik, ketidakjelasan posisi sering kali lebih berbahaya daripada perbedaan posisi itu sendiri.

Telah terbit

SINERGi

Menguatkan Integritas, Meneguhkan Pelayanan

Edisi Juni 2026